

LAPORAN KINERJA TAHUN 2024



oleh:

**Direktorat ikan Air Payau
Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya
Kementerian Kelautan dan Perikanan**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta dukungan kerja sama dari semua pihak terkait di lingkup Direktorat Ikan Air Payau, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Ikan Air Payau periode tahun 2024 ini dapat terlaksana dengan baik. LKj Direktorat Ikan Air Payau tahun 2024 ini disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden (Perpres) nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi dan misi yang dibebankan kepada Direktorat Ikan Air Payau dalam periode tahun 2024.

Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*), serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ke depan.

Semoga laporan ini dapat menjadi tolak ukur dan memberikan umpan balik bagi peningkatan kinerja bagi Direktorat Ikan Air Payau, serta menjadi motivasi untuk meningkatkan pembangunan perikanan budi daya yang berkelanjutan

Jakarta, 17 Januari 2024
Plt. Direktur Ikan Air Payau

Irma Minarti HRP, S.Pi., M.Si
NIP. 19790715 200212 2 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Ikan Air Payau Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden (Perpres) nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan laporan kinerja Direktorat Ikan Air Payau merujuk pada Rencana Strategis (Renstra) Perikanan Budi daya Tahun 2020-2024 serta Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Ikan Air Payau tahun 2024 yang memuat indikator kinerja, target yang akan dicapai, realisasi kinerja, kendala/permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan indikator kinerja, dan rencana aksi yang akan dilakukan sebagai bentuk rekomendasi yang akan dilaksanakan di periode yang akan datang.

Direktorat Ikan Air Payau telah menetapkan peta strategis tahun 2024 dengan 5 (lima) Sasaran Strategis (SS) dan 17 (tujuh belas) kegiatan yang terdiri atas 9 (sembilan) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 8 (delapan) Indikator Kinerja Manajerial (IKM). Sasaran kegiatan satker Direktorat Ikan Air Payau adalah sebagai berikut:

1. SK-1: Terserapnya tenaga kerja sektor perikanan budi daya bidang ikan air payau. Kegiatan ini memiliki 1 (satu) IKK, yaitu: Tenaga kerja yang terlibat di bidang budi daya ikan air payau adalah 10.284 orang;
2. SK-2 : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudi dayaan Ikan. Kegiatan ini memiliki 3 (tiga) IKK, yaitu:
 - a) Kelembagaan usaha pembudi daya ikan yang berkembang dengan target yang ditetapkan sebesar 15 lembaga;
 - b) Persentase sarana dan prasarana bud daya ikan air tawar dan ikan laut yang dimanfaatkan dengan target yang ditetapkan sebesar 75 persen;
 - c) Persentase kelompok penerima yang memanfaatkan bantuan pupuk dengan target yang ditetapkan sebesar 75 persen.
3. SK-3: Meningkatnya akses permodalan dan jaminan usaha bidang produksi dan usaha. Kegiatan ini memiliki 4 (empat) IKK, yaitu:
 - a) Pembudi daya ikan yang mendapatkan bantuan premi asuransi perikanan bagi pembudi daya ikan kecil dengan target yang ditetapkan sebanyak 500 orang;
 - b) Unit usaha yang mendapat pelayanan usaha dan beraktivitas sesuai dengan ketentuan dengan target yang ditetapkan sebanyak 60 unit usaha;
 - c) Persentase NSPK bidang produksi dan usaha yang disusun dengan ketentuan dengan target yang ditetapkan sebanyak 80 persen;
 - d) Pembudi daya ikan yang difasilitasi untuk sertifikasi hak atas tanah dalam rangka mendukung akses pembiayaan dengan target yang ditetapkan sebanyak 3.000 orang.

4. SK-4 Meningkatnya Kualitas Pengendalian Dan Pengawasan Perikanan Budi daya Bidang Produksi Dan Usaha. Kegiatan ini memiliki 1 (satu) IKK, yaitu: Persentase unit usaha yang mendapatkan pembinaan CBIB dengan target yang ditetapkan sebesar 50 persen.

5. SK-5. Tata kelola Pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Ikan Air Payau. Kegiatan ini memiliki 7 (tujuh) IKK, yaitu:

- a) Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Ikan Air Payau dengan target nilai yang ditetapkan sebesar 85;
- b) Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup Direktorat Ikan Air Payau dengan target nilai yang ditetapkan sebesar 82;
- c) Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Ikan Air Payau dengan target yang ditetapkan sebesar 80 persen;
- d) Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat Ikan Air Payau dengan target yang ditetapkan sebesar 94 persen;
- e) Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Direktorat Ikan Air Payau dengan target yang ditetapkan sebesar 80 persen;
- f) Persentase pelaku usaha kelautan perikanan yang terintegrasi KUSUKA dengan target yang ditetapkan sebesar 91 persen;
- g) Persentase layanan perkantoran Direktorat Ikan Air Payau dengan target yang ditetapkan sebesar 80 persen;
- h) Persentase realisasi keuangan Direktorat Ikan Air Payau dengan target yang ditetapkan sebesar 98 persen.

Berdasarkan 17 (tujuh belas) indikator kinerja sebanyak 6 (enam) indikator kinerja telah dilakukan penghitungan capaian realisasi kegiatan dengan target yang telah ditentukan pada tahun 2024, adapun indikator kinerja tersebut yaitu:

1. Tenaga kerja yang terlibat di bidang budi daya ikan air payau, pengukuran indikator kinerja ini dilakukan tahunan dengan target di tahun 2024 sebanyak 10.284 orang dan realisasi yang tercapai adalah 8.714 orang sehingga nilai capaian untuk indikator kegiatan ini belum mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2024.
2. Kelembagaan usaha pembudi daya ikan yang berkembang, pengukuran indikator kinerja ini dilakukan tahunan dengan target di tahun 2024 sebanyak 15 lembaga dan realisasi yang tercapai adalah 15 lembaga sehingga nilai capaian untuk indikator kegiatan ini sudah mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2024.
3. Persentase sarana dan prasarana budi daya ikan air tawar dan ikan laut yang dimanfaatkan, pengukuran indikator kinerja ini dilakukan tahunan dengan target di tahun 2024 sebesar 75% dan realisasi yang tercapai adalah 100

persen sehingga nilai capaian untuk indikator kegiatan ini sudah melebihi dari target yang ditetapkan pada tahun 2024.

4. Persentase kelompok penerima yang memanfaatkan bantuan pupuk dibandingkan dengan penerima, pengukuran indikator kinerja ini dilakukan tahunan dengan target di tahun 2024 sebesar 75% dan realisasi yang tercapai adalah 100% sehingga nilai capaian untuk indikator kegiatan ini sudah melebihi dari target yang ditetapkan pada tahun 2024.
5. Pembudi daya ikan yang mendapatkan bantuan premi asuransi perikanan, pengukuran indikator kinerja ini dilakukan tahunan dengan target di tahun 2024 sebesar 500 orang dan untuk tahun 2024 belum terdapat capaian dikarenakan anggaran untuk kegiatan direalokasi untuk kegiatan yang lain.
6. Unit usaha yang mendapat pelayanan usaha dan beraktivitas sesuai dengan ketentuan, pengukuran indikator kinerja ini dilakukan triwulanan dengan target di Triwulan IV atau akhir periode tahun 2024 sebanyak 60 unit usaha dan realisasi yang tercapai adalah 118 unit usaha sehingga nilai capaian untuk indikator kegiatan ini melebihi dari target yang ditetapkan.
7. Persentase NSPK bidang produksi dan usaha yang disusun, pengukuran indikator kinerja ini dilakukan tahunan dengan target di tahun 2024 sebesar 80% dan realisasi yang tercapai adalah 121,05% sehingga nilai capaian untuk indikator kegiatan ini melebihi dari target yang ditetapkan pada tahun 2024.
8. Pembudi daya ikan yang difasilitasi untuk sertifikasi hak atas tanah dalam rangka mendukung akses pembiayaan, pengukuran indikator kinerja ini dilakukan triwulanan dengan target di Triwulan IV atau akhir periode tahun 2024 sebesar 3.000 orang dan realisasi yang tercapai sebesar 5.012 orang sehingga nilai capaian untuk indikator kegiatan ini melebihi dari target yang ditetapkan.
9. Persentase unit usaha yang mendapatkan pembinaan CBIB, pengukuran indikator kinerja ini dilakukan tahunan dengan target sebesar 50% dan realisasi yang tercapai sebesar 100% sehingga nilai capaian untuk indikator kegiatan ini melebihi dari target yang ditetapkan.
10. Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Ikan Air Payau, pengukuran indikator kinerja ini dilakukan tahunan dengan target nilai 85 dan realisasi nilai yang tercapai sebesar 78 sehingga nilai capaian untuk indikator kegiatan ini belum mencapai target yang ditetapkan.
11. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Ikan Air Payau, pengukuran indikator kinerja ini dilakukan tahunan dengan target nilai 82 dan realisasi nilai yang tercapai sebesar 82 sehingga nilai capaian indikator kegiatan ini sudah mencapai target yang ditetapkan.
12. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Ikan Air Payau, pengukuran indikator kinerja ini dilakukan triwulanan dengan target di Triwulan IV sebesar 80% dan realisasi yang tercapai sebesar 93,94% sehingga nilai capaian untuk indikator kegiatan ini melebihi dari target yang ditetapkan.
13. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat Ikan Air Payau, pengukuran indikator kinerja ini

dilakukan triwulanan dengan target di Triwulan IV sebesar 94% dan realisasi yang tercatat sebesar 133,33% sehingga nilai capaian untuk indikator kegiatan ini melebihi dari target dari yang ditetapkan.

14. Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Direktorat Ikan Air Payau, pengukuran indikator kinerja ini dilakukan tahunan dengan target nilai sebesar 80 dan realisasi nilai yang tercatat sebesar 82,56, sehingga nilai capaian untuk indikator kegiatan ini melebihi dari target dari yang ditetapkan.
15. Persentase pelaku usaha kelautan perikanan yang terintegrasi KUSUKA, pengukuran indikator kinerja ini dilakukan tahunan dengan target sebesar 91% dan realisasi yang tercatat sebesar 100%, sehingga nilai capaian untuk indikator kegiatan ini melebihi dari target dari yang ditetapkan.
16. Persentase layanan perkantoran Direktorat Ikan Air Payau, pengukuran indikator kinerja ini dilakukan triwulanan dengan target di Triwulan IV sebesar 80% dan realisasi yang tercatat sebesar 96,99% sehingga nilai capaian untuk indikator kegiatan ini melebihi target dari yang ditetapkan.
17. Persentase realisasi keuangan Direktorat Ikan Air Payau, pengukuran indikator kinerja ini dilakukan triwulanan dengan target di Triwulan IV sebesar 98% dan realisasi yang tercatat sebesar 99,93% sehingga nilai capaian untuk indikator kegiatan ini sudah memenuhi target dari yang ditetapkan.

Peningkatan kinerja terhadap pencapaian beberapa IKU yang masih belum mencapai target maka menjadi perhatian bagi satker Direktora Ikan Air Payau pada beberapa kegiatan pendukung IKU dimaksud serta melakukan penyempurnaan terhadap kebijakan yang ada untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran strategis. Dengan demikian, diharapkan senantiasa melakukan perbaikan kinerja dalam rangka mendorong tercapainya indikator kinerja Direktorat Ikan Air Payau yang efektif dan efisien.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I. PENDAHULUAN	10
1.1. Latar Belakang	10
1.2. Maksud dan Tujuan.....	11
1.3. Tujuan dan Fungsi	11
1.4. Sumber Daya Manusia.....	13
1.5. Potensi dan Permasalahan Pembangunan Perikanan Budi daya	14
1.5.1. Potensi	14
1.5.2. Permasalahan	16
1.6. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja.....	17
BAB II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA	18
2.1. Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024	18
2.2. Sasaran Strategis	19
2.3. Penetapan Kinerja Tahun 2024	20
2.4. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024	25
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	26
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	26
3.2 Analisis Capaian Kinerja	28
3.2.1. Sasaran Kegiatan (SK-1) : Ekonomi Sektor Perikanan Budi daya Meningkat yang Menjadi Tanggung Jawab Direktorat Produksi dan Usaha Budi daya	28
3.2.2. Sasaran Kegiatan (SK-2): Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudi dayaan Ikan	Error! Bookmark not defined.

3.2.3. Sasaran Kegiatan (SK-3): Meningkatnya Akses Permodalan dan Jaminan Usaha	40
3.2.4. Sasaran Kegiatan (SK-4): Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budi daya Bidang Produksi dan Usaha	49
3.2.5. Sasaran Kegiatan (SK-5) : Tata Kelola Pemerintah yang baik lingkup Produksi dan Usaha Budi daya	54
BAB IV. PENUTUP	69

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tingkat Pendidikan Pegawai Direktorat Produksi dan Usaha Budi daya....	14
Tabel 2. Capaian Sasaran Strategis Direktorat Produksi dan Usaha Budi daya Selama Periode Triwulan IV Tahun 2024	266
Tabel 3. Capaian IKU Terserapnya Tenaga Kerja Sektor Perikanan Budi Daya Bidang Ikan Air Payau.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4 Rincian Capaian Tenaga Kerja yang Terlibat di Bidang Budi Daya Ikan Air Payau	30
Tabel 5. Capaian IKU Kelembagaan Usaha Pembudi daya Ikan yang Berkembang	30
Tabel 6. Capaian IKU Persentase Sarana dan Prasarana Budi Daya Ikan Air Tawar dan Ikan Laut yang Dimanfaatkan (Persen)	35
Tabel 7. Capaian IKU Persentase Kelompok Penerima Yang Memanfaatkan Bantuan Pupuk Dibandingkan Dengan Penerima (Persen).....	37
Tabel 8. Capaian IKU Pembudi daya Ikan yang Mendapatkan Bantuan Premi Asuransi Perikanan bagi Pembudi daya Ikan Kecil (Persen).....	40
Tabel 9. Capaian IKU Unit Usaha yang Mendapat Pelayanan Usaha dan Beraktivitas Sesuai dengan Ketentuan (Unit Usaha)	43
Tabel 10. Capaian IKU Persentase NSPK Bidang Produksi Dan Usaha Yang Disusun (Persen).....	46
Tabel 11. Capaian IKU Pembudi daya Ikan yang difasilitasi untuk Sertifikasi Hak Atas Tanah dalam Rangka Mendukung Akses Pembiayaan (Orang)	489
Tabel 12. Capaian IKU Persentase Unit Usaha yang Mendapatkan Pembinaan CBIB (Persen)	Error! Bookmark not defined.
Tabel 13. Capaian IKU Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Ikan Air Payau	57
Tabel 14. Capaian IKU Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Direktorat Ikan Air Payau	59
Tabel 15. Capain IKU Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Satker Direktorat Ikan Air Payau.	60

Tabel 16. Capaian IKU Presentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Direktorat Ikan Air Payau.....	63
Tabel 17. Capaian IKU Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas / Strategis Lingkup Direktorat Ikan Air Payau.....	64
Tabel 18. Capaian IKU Persentase Pelaku Usaha Kelautan Perikanan yang Terintegrasi KUSUKA.....	65
Tabel 19. Capaian IKU Persentase Layanan Perkantoran Dit. Ikan Air Payau	66
Tabel 20. Capaian IKU Persentase Realisasi Keuangan Dit. Ikan Air Payau.....	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Produksi dan Usaha Budi daya	13
Gambar 2. Keragaan Pejabat Fungsional Umum dan Fungsional Tertentu di Direktorat Produksi dan Usaha Budi Daya	14
Gambar 3. Luas Perikanan Budi daya Eksisting Tahun 2020	15
Gambar 4. Arah Kebijakan Perikanan Budi daya Tahun 2020 – 2024	18
Gambar 5. Arah Kebijakan dan Strategi Perikanan Budi daya 2020 – 2024	19
Gambar 6. Perjanjian Kinerja Dit.Produksi dan Usaha Budi daya Tahun 2024.....	24
Gambar 7. Hasil pengukuran kinerja sampai Triwulan IV tahun 2024.....	255
Gambar 8. Matrik Perhitungan Indeks profesionalitas ASN	577
Gambar 9. Jumlah rekomendasi hasil pengawasan di Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Triwulan II Tahun 2024	62

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia mempunyai potensi sumber daya alam kelautan dan perikanan yang sangat besar. Peran penting kelautan dan perikanan tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 – 2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020. RPJMN ini berpedoman pada visi presiden yaitu terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong, selanjutnya dalam mewujudkan visi ini ditetapkan nawacita kedua yang merupakan misi presiden.

Arah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait pembangunan perikanan budi daya adalah mengoptimalkan dan memperkuat perikanan budi daya untuk penyerapan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan nilai tambah serta penyediaan sumber protein hewan untuk konsumsi masyarakat melalui pengembangan industrialisasi perikanan budi daya yang berkelanjutan. Pembangunan perikanan budi daya tersebut didukung dengan modernisasi teknologi dan manajemen usaha yang efisien, kemudahan akses permodalan dan perizinan usaha, infrastruktur yang memadai, sarana input produksi yang bermutu, perlindungan usaha budi daya dan sinergisitas program lintas sektor.

Strategi yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan pembangunan perikanan budi daya yang berkelanjutan tahun 2021 – 2024 dikemas dalam program terobosan KKP yaitu: (1) pengembangan perikanan budi daya yang berorientasi ekspor. Hal ini dilakukan karena memperhatikan tren volume dan nilai ekspor serta kontribusi produksi Indonesia terhadap pangsa pasar global maka ditetapkan komoditas yang akan dikembangkan, yaitu udang, lobster, kepiting dan rumput laut, dan (2) pembangunan kampung perikanan budi daya sesuai dengan kearifan lokal. Hal ini dilakukan sesuai dengan potensi masing-masing lokasi maka direncanakan model lokasi kampung yaitu kampung budi daya komoditas air tawar, kampung budi daya komoditas air payau dan kampung budi daya komoditas laut.

Dengan ditetapkannya arah kebijakan dan strategi pembangunan perikanan budi daya, maka sasaran strategis pembangunan perikanan budi daya berdasarkan tujuan yang akan dicapai telah dijabarkan dalam 4 (empat) perspektif dengan masing-masing

indikator kinerja sebagaimana tercantum pada Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budi daya KKP untuk mengatasi tantangan global dan permasalahan yang menuntut perubahan paradigma dan desain percepatan pembangunan perikanan.

Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 17 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden (Perpres) nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Permen PAN dan RB RI nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa setiap kementerian berkewajiban menyusun Laporan Kinerja (LKj) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) maupun Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang dibuat sebelumnya. LKj juga merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga prinsip pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab (*good governance*) dapat diwujudkan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Ikan Air Payau periode tahun 2024 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan program atau kegiatan dan pengelolaan anggaran Direktorat Ikan Air Payau. Tujuan penyusunan LKj Direktorat Ikan Air Payau tahun 2024 adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran Direktorat Ikan Air Payau selama tahun 2024. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan suatu kesimpulan yang dapat menjadi salah satu bahan masukan dan referensi dalam menetapkan kebijakan pembangunan perikanan budi daya ke depan sehingga terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan.

1.3. Tujuan dan Fungsi

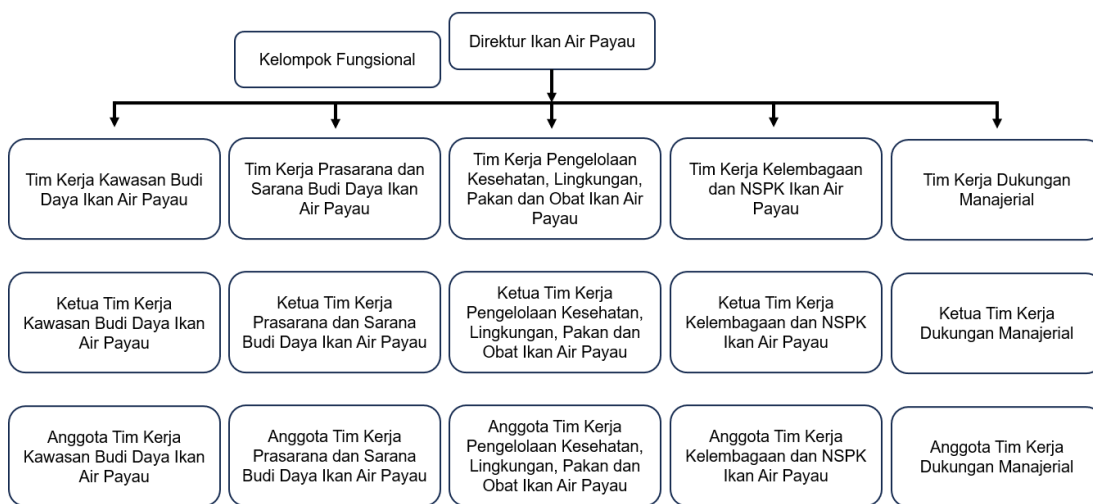
Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 51 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Ikan Air Payau mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang

pengelolaan perikanan budi daya pada komoditas ikan air payau. Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Ikan Air Payau menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut:

- (i) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi perikanan budi daya, pemanfaatan dan pengelolaan kawasan pembudi dayaan ikan, pengelolaan prasarana dan sarana pembudi dayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah, pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudi dayaan ikan, dan pengelolaan usaha perikanan budi daya, serta perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan pada komoditas ikan air payau;
- (ii) Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang standardisasi perikanan budi daya, pemanfaatan dan pengelolaan kawasan pembudi dayaan ikan, pengelolaan prasarana dan sarana pembudi dayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah, pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudi dayaan ikan, dan pengelolaan usaha perikanan budi daya, serta perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan pada komoditas ikan air payau;
- (iii) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi perikanan budi daya, pemanfaatan dan pengelolaan kawasan pembudi dayaan ikan, pengelolaan prasarana dan sarana pembudi dayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah, pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudi dayaan ikan, dan pengelolaan usaha perikanan budi daya, serta perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan pada komoditas ikan air payau;
- (iv) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi perikanan budi daya, pemanfaatan dan pengelolaan kawasan pembudi dayaan ikan, pengelolaan prasarana dan sarana pembudi dayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah, pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudi dayaan ikan, dan pengelolaan usaha perikanan budi daya, serta perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan pada komoditas ikan air payau;
- (v) Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Ikan Air Payau

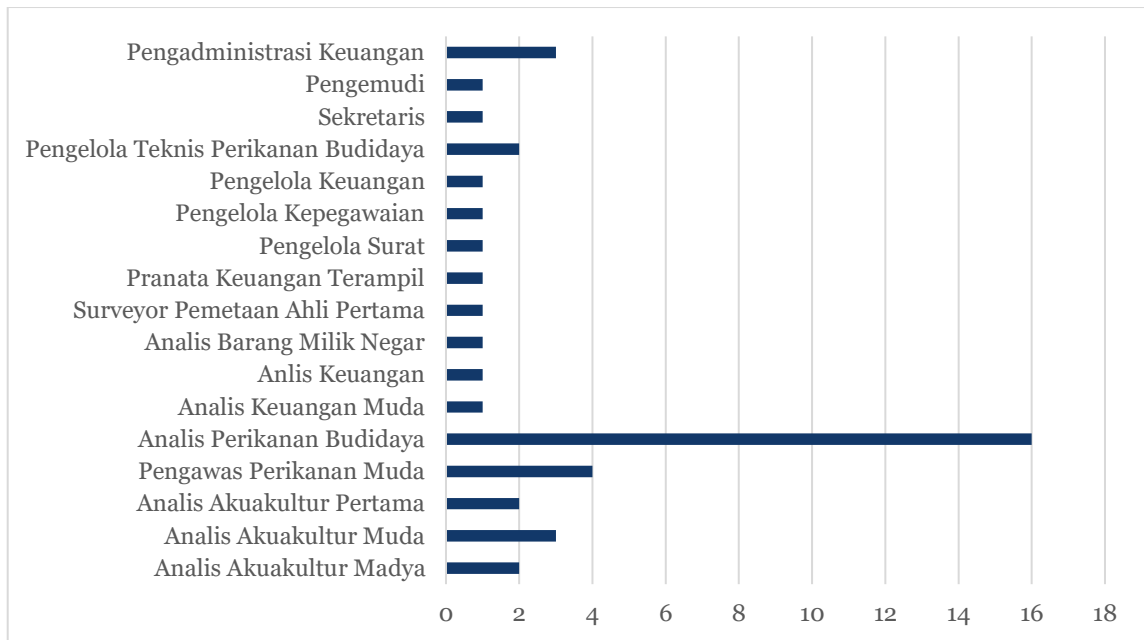
1.4. Sumber Daya Manusia

Sesuai dengan peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022 dan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 5 Tahun 2024 terjadi perubahan mekanisme kerja baru di Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, salah satunya adalah dengan melakukan perubahan organisasi Direktorat Produksi dan Usaha Budi daya menjadi Direktorat Ikan Air Payau. Sehingga susunan struktur organisasi Direktorat Ikan Air Payau di tahun 2024 terdiri atas Direktur Ikan Air Payau dan 5 (lima) Tim kerja. Susunan struktur organisasi dapat dilihat pada gambar dibawah:



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Ikan Air Payau

Jumlah pegawai Direktorat Ikan Air Payau sampai dengan September tahun 2024 adalah 42 orang yang terdiri dari pegawai PNS sejumlah 39 orang, dan tenaga kontrak sejumlah 4 orang. Data pegawai jika dilihat berdasarkan jenis jabatan di Direktorat Ikan Air Payau masih terbagi menjadi dua yaitu jabatan fungsional umum dan jabatan fungsional tertentu. Keragaan pejabat fungsional umum dan tertentu Direktorat Ikan Air Payau dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Keragaan Pejabat Fungsional Umum dan Fungsional Tertentu di Direktorat Ikan Air Payau

Sedangkan Berdasarkan tingkat pendidikan, komposisi SDM Direktorat Ikan Air Payau adalah sebagai berikut: (i) S2 sejumlah 14 orang (33,34%); (ii) S1/D4 sejumlah 19 orang (45,23%); (iii) D3 sejumlah 3 orang (6,52%); dan (iv) SLTA/D1/D2 sejumlah 6 orang (13,04%).

Tabel 1. Tingkat Pendidikan Pegawai Direktorat Ikan Air Payau

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai (orang)	%
1.	Magister (S2)	14	33,34
2.	Sarjana (S1/D4)	19	45,23
3.	Diploma (D3)	3	6,53
4.	SLTA/ DI /D2	6	13,05
Jumlah		42	100

1.5. Potensi dan Permasalahan Pembangunan Perikanan Budi Daya

1.5.1. Potensi

Berdasarkan jenis tipologi ekosistem maka luas potensi perikanan budi daya dapat diklasifikasikan menjadi tiga yaitu perikanan budi daya laut, perikanan budi daya air payau, dan perikanan budi daya air tawar. Luas total potensi lahan perikanan budi daya di Indonesia mencapai 17,92 juta hektar yang terdiri dari 12,12 juta hektar

potensi budi daya laut; 2,96 juta hektar lahan perikanan budi daya air payau; dan 2,84 juta hektar potensi budi daya air tawar.

Pemanfaatannya hingga saat ini masing-masing baru 10,16 persen untuk budi daya air tawar, 22,92 persen pada budi daya air payau dan 0,84 persen untuk budi daya laut. Tingkat pemanfaatan ini masih rendah terutama untuk budi daya laut sehingga diperlukan upaya pemanfaatan agar produksi perikanan budi daya dapat terus ditingkatkan. Peningkatan produksi perikanan budi daya harus disertai dengan peningkatan serapan pasar baik ekspor maupun konsumsi dalam negeri.

Pemanfaatan lahan perikanan budi daya masih sangat kecil dengan rata rata sebesar 11,31 % dengan rincian berikut: (i) 102.254 hektar (0,84%) untuk perikanan budi daya air laut; (ii) 679.448 hektar (22,92%) untuk perikanan budi daya air payau; (iii) 287.521 hektar (10,16%) untuk perikanan budi daya air tawar (Satudata KKP 2022).

No.	Jenis Budidaya <i>Type of Aquaculture</i>	Potensi <i>Potency</i> ¹⁾	Pemanfaatan <i>Usage</i> ²⁾	Peluang Pengembangan <i>Developing Opportunity</i>	Persentase Pemanfaatan Lahan Budidaya <i>Percentage of Usage Aquaculture Area</i>
1	Laut - <i>Marine culture</i>	12.123.383	102.254	12.021.129	0,84
2	Payau - <i>Brackishwater culture</i>	2.964.331	679.448	2.284.883	22,92
3	Tawar - <i>Freshwater culture</i>	2.830.540	287.521	2.543.019	10,16

Keterangan - *Note*:

¹⁾ Data berdasarkan buku saku statistik perikanan budidaya tahun 2015;

²⁾ Data berdasarkan Validasi Nasional Satu Data Kelautan dan Perikanan 2020

Gambar 3. Luas Perikanan Budi Daya Eksisting Tahun 2020
(Sumber: Jurnal Kelautan dan Perikanan dalam angka tahun 2022, ISSN 2829-7660. Volume 1 Tahun 2022)

Ditinjau dari aspek ekonomi, dan sosial perikanan budi daya merupakan salah satu subsektor yang mempunyai potensi dan peran strategis sebagai alternatif untuk peningkatan perekonomian nasional, kesejahteraan sosial dan ketahanan pangan nasional. Potensi produksi perikanan budi daya di Indonesia diestimasi mencapai 100 juta ton/tahun dengan nilai produksi mencapai 251 miliar US Dolar (Dahuri 2018). Pengembangan perikanan budi daya diestimasi akan menciptakan lapangan pekerjaan sebesar 15 juta orang pada tahun 2030, apabila kebijakan peningkatan produksi yang berorientasi ekspor dan domestik diimplementasikan secara tepat dan berkelanjutan di Indonesia. Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, sektor perikanan budi daya mempunyai peran yang sangat penting untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan yang telah ditetapkan dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs). *Food Agriculture Organization* (FAO), menyebutkan bahwa perikanan

budi daya mempunyai relevansi terhadap pencapaian SDGs terutama dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional (*goal 1*), motor penggerak perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan pembudi daya dan penciptaan lapangan kerja (*goal 4*), menjamin ketersediaan suplai ikan melalui peningkatan produksi ikan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan (*goal 12*), dan pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan (*goal 14*).

1.5.2. Permasalahan

Perikanan budi daya merupakan salah satu sektor alternatif yang diharapkan menjadi sumber devisa negara dan tidak hanya memainkan peran penting dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja, penyediaan gizi, dan ketahanan pangan nasional. Perikanan budi daya menjadi pilihan logis yang sangat mungkin dikembangkan di sektor kelautan dan perikanan setelah terjadinya stagnasi produksi perikanan tangkap dalam beberapa tahun terakhir (FAO 2007). Potensi perikanan budi daya yang dimiliki Indonesia sangat besar karena tidak hanya didasarkan pada aspek dua dimensi dari ruang namun secara lebih luas dapat dilihat dari tiga dimensi ruang termasuk kedalaman air. Namun pembangunan sektor perikanan budi daya di Indonesia belum dilakukan secara optimal dan berkelanjutan selama ini.

Permasalahan dan tantangan dalam mengoptimalkan pembangunan perikanan budi daya yang berkelanjutan sangat kompleks dimana dalam hal ini dibagi menjadi permasalahan umum, permasalahan internal, dan permasalahan eksternal.

Permasalahan umum yang dihadapi Direktorat Ikan Air Payau dalam peningkatan produksi perikanan budi daya adalah 1) ketersediaan benih di sentra budi daya yang memenuhi kualitas, kuantitas, dan kontinuitas, 2) disparitas antara lokasi sentra produksi yang potensial dikembangkan (seperti daerah terpencil, wilayah timur, dan wilayah perbatasan) dengan sentra sarana dan prasarana seperti pakan ikan, peralatan dan mesin penunjang budi daya, 3) musibah banjir dan bencana alam di sentra budi daya yang menyebabkan kegagalan panen dan rusaknya prasarana budi daya, 4) munculnya penyakit baru dan serangan penyakit pada komoditas utama budi daya sehingga meningkatkan biaya produksi atau kegagalan panen, 5) kurangnya kemampuan beradaptasi pelaku usaha terhadap perubahan dalam usaha budi

dayanya (perubahan iklim, perkembangan teknologi, peningkatan persyaratan pasar dan persaingan usaha)

Permasalahan internal yang dihadapi oleh Direktorat Ikan Air Payau dalam pembangunan perikanan budi daya berkelanjutan adalah 1) keterbatasan anggaran dibandingkan dengan tugas dan fungsi yang diberikan, 2) sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas, 4) keterbatasan kesempatan untuk melakukan sinergitas dalam rangka mendukung peningkatan produksi dan usaha budi daya.

Sedangkan permasalahan eksternal dalam pembangunan perikanan budi daya yang berkelanjutan yaitu 1) kurangnya sinergitas dengan pemangku kepentingan lain seperti asosiasi dan pemerintah daerah, 2) kompleksnya perizinan berusaha bagi pembudi daya di Indonesia, 3) lemahnya stabilitas usaha budi daya bagi skala mikro dan kecil yang menyebabkan kurangnya kepercayaan lembaga pembiayaan (tidak *bankable*), 4) meningkatnya persyaratan produk perikanan budi daya di pasar nasional dan internasional, 5) keterlibatan berbagai pihak dalam penguatan kelembagaan usaha budi daya belum optimal.

Tantangan dalam pengembangan perikanan budi daya berkelanjutan di masa sekarang yaitu: (i) penurunan daya beli konsumen sehingga usaha budi daya harus efisien dan menghasilkan ikan dengan harga terjangkau, (ii) isu kerusakan lingkungan akibat kegiatan budi daya sehingga pelaksanaan kegiatan budi daya harus mempertimbangkan kelestarian lingkungan; (iii) perkembangan teknologi dan perubahan demografi penduduk sehingga perlu penyesuaian dalam kegiatan usaha budi daya dan pemasaran hasilnya. (iv) persaingan ekspor akibat peningkatan produksi budi daya di beberapa negara lain berkembang lebih pesat dengan harga yang bersaing; (v) meningkatnya dampak perubahan iklim terhadap kegiatan budi daya.

1.6. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

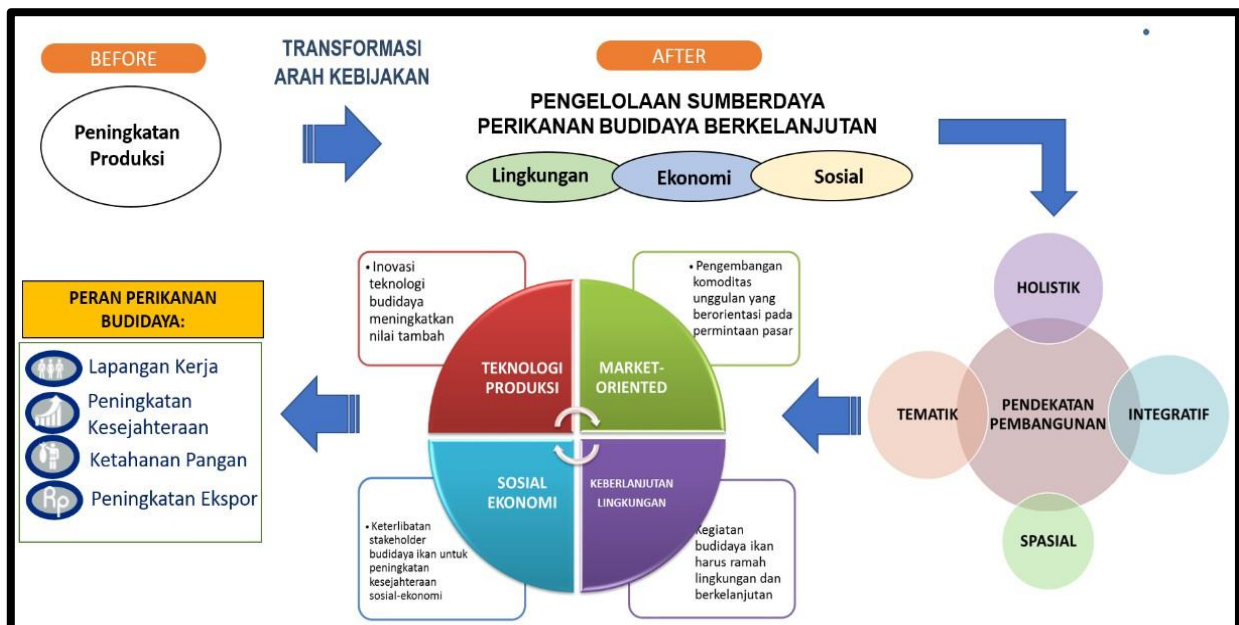
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LKj Direktorat Ikan Air Payau periode Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. **Ikhtisar Eksekutif**, bagian ini menyajikan gambaran menyeluruh secara ringkas tentang capaian kinerja Direktorat Ikan Air Payau selama kurun waktu tahun 2024.
2. **Bab I Pendahuluan**, pada bab ini disajikan hal-hal umum tentang Direktorat Ikan Air Payau serta uraian singkat tentang tugas pokok dan fungsi Direktorat Ikan Air Payau, termasuk latar belakang, maksud dan tujuan penulisan LKj.
3. **Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja**, pada bab ini disajikan rencana strategis, gambaran singkat mengenai sasaran dan kebijakan dan program Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya pada tahun 2020 – 2024, rencana kerja dan anggaran tahun 2024, penetapan kinerja Direktorat Ikan Air Payau serta pengukuran/pengelolaan kinerja Direktorat Ikan Air Payau.
4. **Bab III Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan**, pada bab ini disajikan prestasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Ikan Air Payau serta evaluasi dan analisis kinerja. Dalam bab ini juga disampaikan akuntabilitas keuangan yang mencakup alokasi dan realisasi anggaran termasuk pula penjelasan tentang kinerja anggaran.
5. **Bab IV Penutup**, pada bab ini disajikan tinjauan secara umum tentang keberhasilan, kegagalan serta permasalahan dan kendala utama. Dalam bab ini juga disampaikan saran pemecahan masalah yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya berupa perbaikan perencanaan, kebijakan, dan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan.

BAB II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024

Berdasarkan Rancangan Teknokratis Renstra Perikanan Budi daya 2020-2024, Ditjen Perikanan Budi Daya melaksanakan program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budi daya yang Berkelanjutan. Arah kebijakan pembangunan perikanan budi daya dilakukan dengan mempertimbangkan pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial. Fokus kebijakan bertumpu pada 4 aspek, yaitu: (i) teknologi produksi, melalui inovasi teknologi untuk meningkatkan nilai produksi dan nilai tambah; (ii) sosial ekonomi, melalui keterlibatan semua stakeholder dalam peningkatan kesejahteraan pelaku usaha; (iii) keberlanjutan lingkungan, melalui aktivitas perikanan budi daya ramah lingkungan yang mempertimbangkan daya dukung lingkungan; (iv) berorientasi pasar, artinya perikanan budi daya memproduksi komoditas unggulan yang berorientasi pada permintaan pasar. Pada akhirnya, pembangunan perikanan budi daya diharapkan dapat berperan penting untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan, memenuhi ketahanan pangan nasional, dan peningkatan ekspor produk.



Gambar 4. Arah Kebijakan Pembangunan Perikanan Budi daya Tahun 2020 – 2024

Kebijakan pembangunan perikanan budi daya dikelompokkan menjadi tiga kelompok strategi, meliputi Pengelolaan Kawasan Berkelanjutan, Peningkatan Produksi Perikanan, dan Peningkatan Kesejahteraan Pembudi daya Ikan. Kelompok strategi tersebut kemudian masing- masing dijabarkan dalam strategi, sebagaimana disajikan pada Gambar berikut:



Gambar 5. Arah Kebijakan dan Strategi Perikanan Budi daya 2020 – 2024

2.2. Sasaran Strategis

Sasaran strategis pembangunan perikanan budi daya merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Direktorat Ikan Air Payau sebagai suatu *outcome/impact* dari program yang dilaksanakan. Dalam penyusunan peta strategi terdapat empat perspektif, yaitu *stakeholders prespective*, *customer prespective*, *internal process prespective*, dan *learning and growth prespective* yang dijabarkan dalam 5 (lima) Sasaran Kegiatan dengan masing-masing Indikator Kinerja sebagai berikut :

1. Terserapnya kerja sektor perikanan budi daya bidang ikan air payau:
 - a. Tenaga kerja yang terlibat di bidang budi daya ikan air payau (orang).
2. Terkelolanya sistem produksi dan usaha yang berkelanjutan:
 - a. Kelembagaan usaha pembudi daya ikan yang berkembang (lembaga);
 - b. Persentase sarana dan prasarana budi daya ikan air tawar dan ikan laut yang dimanfaatkan (persen);

- c. Persentase kelompok penerima yang memanfaatkan bantuan pupuk (persen).
3. Meningkatnya akses permodalan dan jaminan usaha bidang produksi dan usaha:
 - a. Pembudi daya ikan yang mendapatkan bantuan premi asuransi perikanan bagi pembudi daya ikan kecil (orang);
 - b. Unit usaha yang mendapat pelayanan usaha dan beraktivitas sesuai dengan ketentuan (unit usaha);
 - c. Persentase NSPK bidang produksi dan usaha yang disusun (persen);
 - d. Pembudi daya ikan yang difasilitasi untuk sertifikasi hak atas tanah dalam rangka mendukung akses pembiayaan (orang).
4. Meningkatnya kualitas pengendalian dan pengawasan perikanan budi daya bidang produksi dan usaha:
 - a. Persentase unit usaha yang mendapatkan pembinaan CBIB (persen).
5. Tata kelola pemerintahan yang baik di Direktorat Ikan Air Payau:
 - a. Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Ikan Air Payau (nilai);
 - b. Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup Direktorat Ikan Air Payau (nilai);
 - c. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Ikan Air Payau (persen);
 - d. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat Ikan Air Payau (persen);
 - e. Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Direktorat Ikan Air Payau (persen);
 - f. Persentase pelaku usaha kelautan perikanan yang terintegrasi KUSUKA (persen);
 - g. Persentase layanan perkantoran Direktorat Ikan Air Payau (persen);
 - h. Persentase realisasi keuangan Direktorat Ikan Air Payau (persen).

2.3. Penetapan Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk: (1) meningkatkan

akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; (2) sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; dan (3) menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Pada Bulan Februari telah diterbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelautan dan Perikanan dimana terjadi perubahan organisasi Eselon II di Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya. Perubahan struktur organisasi di Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya ini efektif dilakukan pada bulan Agustus 2024 dengan susunan organisasi yang baru terdiri atas: Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, Direktorat Ikan Air Tawar, Direktorat Ikan Air Payau, Direktorat Ikan Air Laut, Direktorat Rumput Laut dan kelompok jabatan fungsional. Perubahan susunan organisasi ini mengakibatkan terjadinya perubahan terhadap uraian fungsi, tugas serta perjanjian kinerja yang merupakan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Berdasarkan hasil validasi tim kerja pusat lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya dan Surat Nomor 482/DJPB.5/TU.210/VIII/2024 dari Direktorat Ikan Air Payau kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi daya menyampaikan usulan tim kerja beserta dengan uraian fungsi dari masing – masing tim kerja lingkup Direktorat Ikan Air Payau. Usulan tim kerja yang disampaikan terdiri dari 5 tim kerja yaitu Tim Kerja Kawasan Budi Daya Ikan Air Payau, Tim Kerja Prasarana dan Sarana Budi Daya Ikan Air Payau, Tim Kerja Pengelolaan Kesehatan, Lingkungan , Pakan dan Obat Ikan Air Payau, Tim Kerja Kelembagaan dan NSPK Ikan Air Payau, dan Tim Kerja Dukungan Manajerial. Setiap tim kerja mendapatkan tugas yang telah disepakati bersama dan disahkan dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Ikan Air Payau

Perjanjian kinerja Dit. Ikan Air Payau tahun 2024 dapat dilihat pada gambar berikut:



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3514772
LAMAN www.kkp.go.id SUREL dtjenpb@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT IKAN AIR PAYAU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Irma Minarti HRP**
Jabatan : **Plt. Direktur Ikan Air Payau**
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Tb Haeru Rahayu**
Jabatan : **Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya**
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Juli 2024

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya

Tb Haeru Rahayu

Pihak Pertama
Plt. Direktur Ikan Air Payau

Irma Minarti HRP

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT IKAN AIR PAYAU**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Terserapnya Tenaga Kerja Sektor Perikanan Budi Daya Bidang Ikan Air Payau	1.	Tenaga kerja yang terlibat di bidang budi daya ikan air payau (orang)	10.284
2.	Terkelolanya Sistem Produksi dan Usaha yang Berkelanjutan	2.	Kelembagaan usaha pembudi daya ikan yang berkembang (lembaga)	15
		3.	Persentase sarana dan prasarana budi daya ikan air tawar dan ikan laut yang dimanfaatkan (persen)	75
		4.	Persentase kelompok penerima yang memanfaatkan bantuan pupuk (persen)	75
3.	Meningkatnya Akses Permodalan dan Jaminan Usaha Bidang Produksi dan Usaha	5.	Pembudi daya ikan yang mendapatkan bantuan premi asuransi perikanan bagi pembudi daya ikan kecil (orang)	500
		6.	Unit usaha yang mendapat pelayanan usaha dan beraktivitas sesuai dengan ketentuan (unit usaha)	60
		7.	Persentase NSPK bidang produksi dan usaha yang disusun (persen)	80
		8.	Pembudi daya ikan yang difasilitasi untuk sertifikasi hak atas tanah dalam rangka mendukung akses pembiayaan (orang)	3.000
4.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budi Daya Bidang Produksi dan Usaha	9.	Persentase unit usaha yang mendapatkan pembinaan CBIB (persen)	50
5	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	10.	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Ikan Air Payau (nilai)	85

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
di Direktorat Ikan Air Payau	11. Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup Direktorat Ikan Air Payau (nilai)	82
	12. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Ikan Air Payau (persen)	80
	13. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat Ikan Air Payau (persen)	94
	14. Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Direktorat Ikan Air Payau (persen)	80
	15. Persentase pelaku usaha kelautan perikanan yang terintegrasi KUSUKA (persen)	91
	16. Persentase layanan perkantoran Direktorat Ikan Air Payau (persen)	80
	17. Persentase realisasi keuangan Direktorat Ikan Air Payau (persen)	98

Jakarta, 31 Juli 2024

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya


Tb Haeru Rahayu

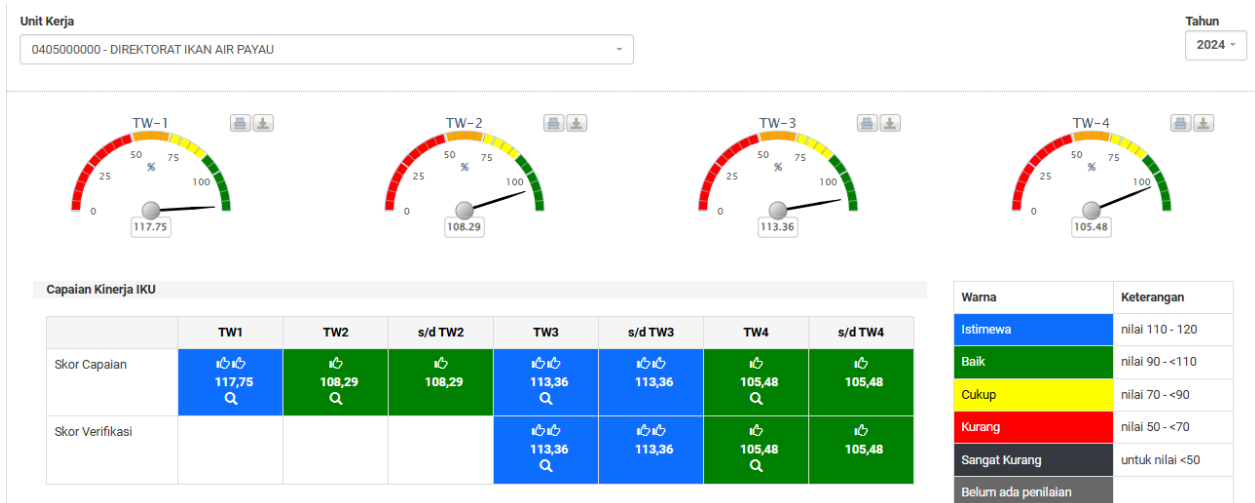
Pihak Pertama
Plt. Direktur Ikan Air Payau


Irma Minarti HRP

Gambar 6. Perjanjian Kinerja Dit.Produksi dan Usaha Budi daya Tahun 2024

2.4. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024

Pengukuran tingkat capaian IKU dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam informasi Indikator Kinerja atau Manual IKU. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja Triwulanan yang didukung dengan implemmentasi Aplikasi BSC <http://kinerjaku.kkp.go.id> yang merupakan Sistem Aplikasi Pengukuran Kinerja berbasis informasi teknologi. Berikut hasil pengukuran kinerja sampai dengan periode Triwulan IV tahun 2024 berdasarkan hasil penilaian pada aplikasi kinerjaku.



Gambar 7. Hasil pengukuran kinerja sampai Triwulan IV tahun 2024

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Kegiatan pembangunan perikanan budi daya pada tahun 2024 sebagaimana Perjanjian Kinerja (PK) Direktur Ikan Air Payau menitikberatkan pada 5 (lima) Sasaran Kegiatan dengan 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja Utama untuk menunjang pencapaian visi dan misi DJPB dan hasil pengukuran kinerja inilah yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja (LKj) tingkat Eselon II.

Berdasarkan sistem pelaporan pada aplikasi <http://kinerjaku.kkp.go.id> diperoleh Nilai Pencapaian sebesar 105,48% (*Seratus lima koma empat delapan persen*). Adapun rekapitulasi capaian kinerja Direktorat Ikan Air Payau pada periode Triwulan IV tahun 2024 seperti pada tabel berikut.

Tabel 2. Capaian Sasaran Strategis Direktorat Ikan Air Payau Selama Periode Triwulan IV Tahun 2024

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target Tahun 2024	Realisasi	% Realisasi
1.	Terserapnya tenaga kerja sektor perikanan budi daya bidang ikan air payau.	1.	Tenaga kerja yang terlibat di bidang budi daya ikan air payau (orang)	10.284	8.714	84,73
2.	Terkelolanya sistem produksi dan usaha yang berkelanjutan.	2.	Kelembagaan usaha pembudi daya ikan yang berkembang (lembaga)	15	15	100
		3.	Persentase sarana dan prasarana budi daya ikan air tawar dan ikan laut yang dimanfaatkan (persen)	75	100	120
		4.	Persentase kelompok penerima yang memanfaatkan bantuan pupuk (persen)	75	100	120
3.	Meningkatnya akses	5.	Pembudi daya ikan yang mendapatkan bantuan premi asuransi perikanan	500	-	-

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target Tahun 2024	Realisasi	% Realisasi
	permodalan dan jaminan usaha bidang produksi dan usaha.		bagi pembudi daya ikan kecil (orang)			
		6.	Unit usaha yang mendapat bantuan premi asuransi perikanan bagi pembudi daya ikan kecil (orang)	60	118	120
		7.	Persentase NSPK bidang produksi dan usaha yang disusun (persen)	80	121,05	120
		8.	Pembudi daya ikan yang difasilitasi untuk sertifikasi hak atas tanah dalam rangka mendukung akses pembiayaan (orang)	3.000	5.012	120
4	Meningkatnya kualitas pengendalian dan pengawasan perikanan budi daya bidang produksi dan usaha.	9.	Persentase unit usaha yang mendapatkan pembinaan CBIB (persen)	50	100	120
5	Tata Kelola pemerintahan yang baik di Direktorat Ikan Air Payau	10.	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Ikan Air Payau (nilai)	85	78	91,76
		11.	Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup Direktorat Ikan Air Payau (nilai)	82	82,05	100,06
		12.	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Ikan Air Payau (persen)	80	93,94	117,43
		13.	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem	94	133,33	120

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi	% Realisasi	
			manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat Ikan Air Payau (persen)			
		14.	Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Direktorat Ikan Air Payau (persen)	80	82,56	103,2
		15.	Persentase pelaku usaha kelautan perikanan yang terintegrasi KUSUKA (persen)	91	100	109,89
		16.	Persentase layanan perkantoran Direktorat Ikan Air Payau (persen)	80	96,99	120
		17.	Persentase realisasi keuangan Direktorat Ikan Air Payau (persen)	98	99,93	101,97

3.2. Analisis Capaian Kinerja

3.2.1. Sasaran Kegiatan (SK-1) : Terserapnya Tenaga Kerja Sektor Perikanan Budi Daya Bidang Ikan Air Payau

IKU 1. Terserapnya Tenaga Kerja Sektor Perikanan Budi Daya Bidang Ikan Air Payau

Sektor perikanan budi daya memiliki potensi tenaga kerja yang besar, karena sebagian besar penduduk tinggal di daerah pedesaan dan juga pesisir yang memiliki potensi usaha perikanan budi daya. Perikanan budi daya dengan karakteristik kerakyatan dan mudah diaplikasikan, dianggap mampu menyerap tenaga kerja, menciptakan lapangan

pekerjaan dan menumbuhkan kewirausahaan baru.

Program prioritas Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan ekonomi dan memberikan kontribusi terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja pada sektor perikanan budi daya meliputi tenaga kerja yang terlibat dalam program-program pemberdayaan sektor perikanan budi daya. Beberapa program di Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya yang dirasakan langsung menyerap tenaga kerja di masyarakat diantaranya melalui program bantuan pemerintah, kegiatan modeling rumput laut berbasis kawasan, PITAP, dan pembangunan klaster.

Target IKU Terserapnya Tenaga Kerja Sektor Perikanan Budi Daya Bidang Ikan Air Payau adalah 10.284 orang. Target IKU tersebut pada TW IV tahun 2024 adalah 10.284 orang, dengan capaian IKU tersebut sampai dengan TW IV sebanyak 8.714 Lembaga, sedangkan jika dibandingkan dengan target tahunan didapatkan capaian sebesar 84,73%.

Tabel 3. Capaian IKU Terserapnya Tenaga Kerja Sektor Perikanan Budi Daya Bidang Ikan Air Payau (Orang)

Nama SS: Terserapnya Tenaga Kerja Sektor Perikanan Budi Daya Bidang Ikan Air Payau								
Indikator Kinerja : Terserapnya Tenaga Kerja Sektor Perikanan Budi Daya Bidang Ikan Air Payau (Orang)								
Realisasi 2020 - 2024				2024			RPJMN 2020 - 2024	
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2024
-	-	8.963	17.310	10.284	8.714	84,73	-	-

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja Terserapnya Tenaga Kerja Sektor Perikanan Budi Daya pada tahun 2022 adalah sebanyak 8.963 orang, pada tahun 2023 sebanyak 17.310 orang dan pada tahun 2024 sebanyak 8.714. Pada tahun 2022 dan 2023 jumlah tenaga kerja dihitung berdasarkan kegiatan yang menjadi tugas Dit. Produksi dan Usaha Budi daya sebagai pelaksana atau koordinator seperti Bantuan Sarana dan Prasarana Budi Daya Ikan Lele atau Nila Sistem Bioflok, Bantuan Pupuk Sub Sektor Perikanan Budi Daya, Bantuan Budi Daya Ikan Hias, Bantuan Budi Daya Komoditas Lokal dan Bantuan Pemerintah Korporasi Pembudi daya Ikan. Pada tahun 2024, terjadi perubahan susunan organisasi di lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya sehingga Dit. Produksi dan Usaha Budi daya menjadi Dit. Ikan Air Payau. Perubahan ini mempengaruhi kegiatan yang mendukung capaian tenaga kerja yang terlibat. Pada tahun 2024, terserapnya tenaga kerja dihitung berdasarkan kegiatan Bantuan Excavator, Bantuan Pupuk Sub Sektor Perikanan Budi Daya, Bantuan PITAP, Asuransi Perikanan bagi Pembudi daya Ikan Kecil, Bantuan Benih dan Calon Induk Ikan Air Payau, dan Bantuan HSRT.

Indikator Kinerja ini tidak terdapat dalam RPJMN tetapi menjadi Indikator Utama pada satker Direktorat Ikan Air Payau. Pada tahun 2024, capaian Terserapnya Tenaga

Kerja Sektor Perikanan Budi Daya Bidang Ikan Air Payau belum mencapai target seperti dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. Rincian Capaian Tenaga Kerja yang Terlibat di Bidang Budi Daya Ikan Air Payau

No.	Kegiatan	Target Jumlah Tenaga Kerja (Orang)	Realisasi Jumlah Tenaga Kerja (Orang)
1	Bantuan Pupuk Sub Sektor Perikanan Budi Daya	5.000	5.816
2	Asuransi Perikanan bagi Pembudi Daya Ikan Kecil	500	
3	PITAP	200	368
4	Bantuan Excavator	480	950
5	Bantuan Benih Ikan	3.464	1.570
6	Bantuan Calon Induk Ikan	600	
7	Bantuan HSRT	40	10
		10.284	8.714

Tidak tercapainya target disebabkan karena permohonan bantuan Bantuan Benih dan Calon Induk Ikan Air Payau dan Bantuan HSRT tidak sesuai dengan target awal. Sementara untuk kegiatan Asuransi Perikanan bagi Pembudi daya Ikan Kecil tidak terlaksana dikarenakan anggaran kegiatan direalokasi untuk kegiatan yang lain.

3.2.2. Sasaran Kegiatan (SK-2): Terkelolanya Sistem Produksi dan Usaha yang Berkelanjutan

IKU 2. Kelembagaan Usaha Pembudi Daya Ikan yang Berkembang

Usaha budi daya perikanan merupakan salah satu usaha subsektor yang diharapkan dalam mewujudkan misi kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan. Budi daya perikanan berkontribusi terhadap kesejahteraan pembudi daya ikan dalam menjamin ketersediaan pangan rumah tangga, gizi dan kesehatan, penyedia lapangan pekerjaan dan pendapatan di pedesaan. Kondisi empiris menunjukkan karakteristik budi daya perikanan di Indonesia didominasi oleh pembudi daya berskala usaha kecil, menerapkan teknologi konvensional, sulit meningkatkan produktivitasnya karena aksesibilitas rendah terhadap modal, teknologi, informasi dan pasar, serta rendahnya kapasitas.

Sesuai dengan arahan presiden ke 7 Joko Widodo, terkait dengan peningkatan usaha petani dan nelayan termasuk pembudi daya ikan dalam mendorong terjadinya

peningkatan skala ekonomi kecil untuk bergabung dan berkolaborasi melalui kelompok atau korporasi besar. Dengan demikian, diharapkan akan berdampak terhadap peningkatan skala ekonomi yang besar pula. Bentuk peningkatan usaha petani dan nelayan tersebut melalui Korporasi.

Korporasi Pembudi daya Ikan adalah suatu kegiatan usaha (agribisnis) yang meliputi usaha hulu hingga hilir yang dijalankan bersama oleh pembudi daya ikan dalam bentuk usaha ekonomi yang berbadan hukum dimana sebagian besar kepemilikan modal dimiliki pembudi daya ikan. Pengembangan Korporasi Petani dan Nelayan termasuk Pembudi daya Ikan tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 dan tertuang dalam Proyek Prioritas Strategis (Major Project) yaitu Penguatan Jaminan Usaha serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan.

Landasan konseptual pengembangan korporasi pembudi daya ikan bertujuan untuk:

- Memfasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan pembudi daya ikan menuju korporasi.
- Mendukung terjadinya perubahan perilaku pembudi daya ikan menjadi mandiri dalam kegiatan pembudi daya ikan.
- Mendorong terjadinya peningkatan produktivitas komoditas perikanan yang dibudi dayakan.
- Mendorong peningkatan pendapatan dan kesejahteraan pembudi daya ikan.

Pelaku-pelaku dalam korporasi pembudi daya ikan mendapatkan keuntungan dari terbentuknya efisiensi kolektif (collective efficiency); secara bersama memberikan efek spillover/keuntungan kepada pelaku-pelaku lain lingkungan sekitar dan melaksanakan aksi bersama (joint actions) yang bersifat aktif bagi pelaku-pelaku dalam korporasi.

Korporasi pembudi daya ikan merupakan bentuk kerjasama usaha yang berbadan hukum yang mengintegrasikan kegiatan bisnis on farm dengan off farm dimana pembudi daya ikan memiliki sebagian besar modal dan dikelola oleh secara profesional dengan memanfaatkan 8 (delapan) pilar komponen korporasi yaitu:

- Penerapan “Corporate Farming”.
- Konsolidasi Kelembagaan.
- Adopsi Inovasi Teknologi.
- Sinergi.

- Kemudahan Akses Pembiayaan.
- Pelibatan Off Taker.
- Digitalisasi / Penerapan Informasi Teknologi.
- Dukungan Logistik.

Pada Tahun 2024, anggaran yang ditetapkan untuk Korporasi Perikanan Budi daya sebesar Rp.2.250.000.000,- dalam perjalanannya anggaran kegiatan ini dilakukan realokasi Sebagian anggarannya untuk mendukung kegiatan prioritas Ditjen Perikanan Budi Daya lainnya sebesar Rp. 1.000.000.000,-, sehingga alokasi anggaran yang dapat digunakan sebesar Rp. 1.250.000.000,- sampai dengan akhir triwulan IV capaian realisasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 1.249.896,700,- (99.99%).

Tabel 5. Capaian IKU Kelembagaan Usaha Pembudi daya Ikan yang Berkembang

Nama SS: Terkelolanya Sistem Produksi dan Usaha yang Berkelanjutan								
Indikator Kinerja : Kelembagaan Usaha Pembudi Daya Ikan yang Berkembang (Lembaga)								
Realisasi 2020 - 2024				2024			RPJMN 2020 - 2024	
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2024
-	-	-	10	15	15	100	-	-

Pada tabel di atas, capaian IKU Korporasi perikanan budi daya yang menjadi tanggung jawab Direktorat Ikan Air Payau di triwulan IV tahun 2024 ini sudah mencapai target dikarenakan pada periode ini telah dilaksanakan seluruh pelaksanaan kegiatan mulai dari identifikasi lokasi, penetapan koperasi, sosialiasi dan pelaksanaan temu lapang pendampingan teknis korporasi. Indikiator Kinerja ini tidak terdapat dalam RPJMN tahun 2020-2024 tetapi menjadi Indikator Utama pada satker Direktorat Ikan Air Payau.

Kegiatan korporasi yang telah dilaksanakan sampai dengan triwulan IV tahun 2024 antara lain adalah:

- Inventarisasi hasil perjalanan dinas dalam rangka identifikasi dan verifikasi CPCL Koperasi calon peserta Korporasi Pembudi daya Ikan dengan hasil sebagaimana berikut:

NO	NAMA KOPERASI	KABUPATEN/ KOTA	PROVINSI	INDEK CALON LOKASI	INDEK KEMATANGAN KOPERASI
1	Koperasi Mina Mulya Sari	Bengkulu Utara	Bengkulu	245	390

NO	NAMA KOPERASI	KABUPATEN/ KOTA	PROVINSI	INDEK CALON LOKASI	INDEK KEMATANGAN KOPERASI
2	Koperasi Serba Usaha Central Lele	Situbondo	Jawa Timur	206	395
3	Koperasi Makkio Dale	Takalar	Sulawesi Selatan	199	365
4	Koperasi Amanat Petani Indonesia	Tasikmalaya	Jawa Barat	229	310
5	Koperasi Produksi Generasi Mandiri	Bengkalis	Riau	284	398
6	Koperasi Tani Beriuk Sadar	Lombok Tengah	NTB	235	385
7	Koperasi Jaya Barokah Bersama Purwakarta	Purwakarta	Jawa Barat	214	360
8	Koperasi Mina Sejahtera	Binjai	Sumatera Utara	243	335
9	Koperasi Mina Mulya Maju Mandiri	Gunung Kidul	DIY	235	470
10	Koperasi Usaha Bersama Sejati	Bombana	Sulawesi Tenggara	197	275
11	Koperasi Perikanan Mina Agung Lestari	Lampung Selatan	Lampung	172	325
12	Koperasi Pembenuh Ikan	Boyolali	Jawa Tengah	231	165
13	Koperasi Hasil Berkat Lautan Indonesia	Tarakan	Kalimantan Utara	175	465
14	Koperasi BP3N Jawa Barat	Sukabumi	Jawa Barat	216	430
15	Koperasi Tanjung Masagenae Indah	Kolaka	Sulawesi Tenggara	256	260
16	Koperasi Mina Manunggal	Sleman	DIY	245	465
17	Koperasi Mina Muara Samudera	Lebak	Banten	218	445
18	Koperasi Hasil Berkat Lautan Indonesia	Nunukan	Kalimantan Utara	216	235
19	Koperasi Cahaya Nelayan Sejahtera	Deli Serdang	Sumatera Utara	186	295
20	Koperasi Produsen Mandiri Sejahtera Berjaya	Batubara	Sumatera Utara	120	290
21	Koperasi Jaring Mas	Kampar	Riau	293	495
22	Koperasi Produsen Nila Jaya Abadi	Asahan	Sumatera Utara	114	245
23	Koperasi bandeng Sejahtera Manakku	Pangkep	Sulawesi Selatan	275	315
24	Koperasi Produsen Leppe Pesisir Mandiri	Konawe	Sulawesi Tenggara	240	290
25	Koperasi Maju Bersama	Kota Kendari	Sulawesi Tenggara	177	260
26	Koperasi Bina Mina Nusantara	Kota Padang	Sumatera Barat	171	255
27	Koperasi Produsen Asosiasi Pengusaha dan Pembudi daya	Kota Padang	Sumatera Barat	202	305
28	Koperasi Hadi Lestari Jaya	Serang	Banten	190	305
29	Koperasi Produsen Pembudi daya Ikan Windu Mas	Pati	Jawa Tengah	205	315
30	Koperasi Produsen Sinar Laut Indah	Lampung Timur	Lampung	231	430

Berdasarkan hasil identifikasi diatas, dilakukan rapat pembahasan dan evaluasi hingga didapatkan 15 (lima belas) lokasi koperasi yang di tetapkan sebagai lokasi Korporasi Pembudi daya Ikan melalui Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya Nomor 209 Tahun 2024, tanggal 27 Mei 2024 tentang lokasi Korporasi Pembudi daya Ikan Tahun 2024 dengan lokasi penetapan yaitu:

1. Provinsi Sumatera Utara, Kota Binjai
 2. Provinsi Sumatera Utara, Kota Padang
 3. Provinsi Riau, Kabupaten Bengkalis
 4. Provinsi Riau, Kabupaten Kampar
 5. Provinsi Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Utara
 6. Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Timur
 7. Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta
 8. Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Tasikmalaya
 9. Provinsi DI Yogyakarta, Kabupaten Gunung Kidul
 10. Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Pati
 11. Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Situbondo
 12. Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Timur
 13. Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Takalar\
 14. Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Pangkajene Kepulauan
 15. Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Bombana
- b. Melakukan koordinasi dengan Deputi Perkoperasian-Kemenkop UKM, Ditjen PDSPKP dan BLU-LPMUKP dalam rangka pelaksanaan program Korporasi Pembudi daya Ikan dan;
- c. Melakukan Sosialisasi pelaksanaan kegiatan Korporasi Pembudi Daya ikan pada tanggal 24-26 Juli 2024 di Tangerang, Banten dengan mengundang seluruh pengelola koperasi terpilih dengan didampingi Dinas Perikanan setempat.
- d. Melakukan Temu Lapang/Sosialisasi Korporasi Pembudi daya Ikan di lokasi Korporasi Pembudi daya Ikan tahun 2024 yang kemudian dilakukan intervensi pengembangan kelembagaan koperasi pembudi daya ikan melalui kegiatan pendampingan, bimbingan teknis manajemen budi daya dan bimbingan teknis manajemen koperasi serta fasilitasi akses permodalan usaha koperasi dengan melibatkan BLU-LPMUKP dengan jadwal pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Tanggal
1	Pelaksanaan Sosialisasi / Temu Lapang Korporasi Pembudi daya Ikan di Kabupaten Purwakarta, Jabar	11 Juli 2024
2	Sosialisasi / Temu Lapang Korporasi Pembudi daya Ikan di Kabupaten Bengkalis, Riau	16 Oktober 2024
3	Sosialisasi / Temu Lapang Korporasi Pembudi daya Ikan di Kabupaten Situbondo, Jatim	17 Oktober 2024
4	Sosialisasi / Temu Lapang Korporasi Pembudi daya Ikan di Kabupaten Bengkulu Utara,	18 Oktober 2024
5	Sosialisasi / Temu Lapang Korporasi Pembudi daya Ikan di Kabupaten Pangkep, Sulsel	23 Oktober 2024
6	Sosialisasi / Temu Lapang Korporasi Pembudi daya Ikan di Kabupaten Takalar, Sulsel	24 Oktober 2024
7	Sosialisasi / Temu Lapang Korporasi Pembudi daya Ikan di Kabupaten Lombok Tengah, NTB	25 Oktober 2024
8	Sosialisasi / Temu Lapang Korporasi Pembudi daya Ikan di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat	30 Oktober 2024
9	Sosialisasi / Temu Lapang Korporasi Pembudi daya Ikan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah	31 Oktober 2024
10	Sosialisasi / Temu Lapang Korporasi Pembudi daya Ikan di Kota Padang, Sumatera Barat	31 Oktober 2024
11	Sosialisasi/Temu Lapang Korporasi Pembudi daya Ikan di Kabupaten Binjai	7 November 2024
12	Sosialisasi/Temu Lapang Korporasi Pembudi daya Ikan di Kabupaten Bombana	8 November 2024
13	Sosialisasi/Temu Lapang Korporasi Pembudi daya Ikan di Kabupaten Kampar	14 November 2024
14	Sosialisasi/Temu Lapang Korporasi Pembudi daya Ikan di Kabupaten Lampung Timur	14 November 2024
15	Sosialisasi/Temu Lapang Korporasi Pembudi daya Ikan di Kabupaten Gunung Kidul	21 November 2024

IKU 3. Persentase Sarana dan Prasarana Budi daya Ikan Air Tawar dan Ikan Laut yang Dimanfaatkan

Budi daya ikan air tawar memiliki beragam komoditas yang potensial untuk dikembangkan karena memiliki Nilai ekonomis dan teknologi yang sudah banyak dikenal masyarakat. Komoditas ikan air tawar yang banyak dikembangkan untuk budi daya diantaranya adalah ikan Lele, ikan Nila dan ikan Hias yang diantaranya adalah ikan Koi,

ikan Koki dan ikan Cupang.

Terdapat beberapa teknologi budi daya ikan Lele dan ikan Nila yang dikembangkan, antara lain budi daya ikan Nila di kolam air deras atau kolam air tenang, atau melalui sistem intensif dengan probiotik ataupun metode penggantian air untuk budi daya ikan Lele. Sistem Bioflok juga menjadi salah satu teknologi budi daya yang mulai berkembang di masyarakat. Manfaat dari penggunaan sistem Bioflok adalah memungkinkan dalam efisiensi dalam penggunaan air karena mampu memperbaiki kualitas air serta dapat menekan jumlah pakan yang diberikan.

Teknologi budi daya ikan hias saat ini telah dikuasai dengan baik oleh unit pelaksana teknis di lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya maupun oleh masyarakat khususnya pembudi daya ikan hias. Sentra-sentra produksi ikan hias masih terpusat di pulau Jawa seperti Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat. Oleh karena itu perlu upaya untuk menyebarluaskan kegiatan budi daya ikan hias di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu upaya tersebut adalah dilaksanakannya Bantuan Pemerintah Budi Daya ikan Hias Tahun 2024.

Pada tahun 2024 jumlah alokasi paket Bantuan Sarana dan Prasarana Budi Daya ikan Lele atau ikan Nila sistem Bioflok adalah 560 paket yang dilaksanakan oleh 13 UPT DJPB. Untuk mendukung kegiatan ini telah dilakukan penetapan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Sarana dan Prasarana Budi Daya Ikan Lele atau Ikan Nila Tahun 2024 melalui Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya nomor 386 tahun 2023. Berdasarkan hasil monev yang dilaksanakan pada bantuan Bioflok TA 2023 terdapat beberapa penyesuaian terhadap spesifikasi barang seperti layout atap pada 6 kolam dan 8 kolam, ukuran plang nama dan volume pipa pembuangan. Selain itu, dilakukan juga penyesuaian persyaratan calon penerima berdasarkan Permen KP no 19 tahun 2023 dimana calon penerima wajib melampirkan bukti aktif kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional.

Selain itu Bantuan Sarana dan Prasarana Budi Daya ikan Hias juga dialokasikan sebanyak 10 paket yang pada tahun 2024 yang dilaksanakan oleh BBPBAT Sukabumi, BPBAT Sungai Gelam dan BPBL Lombok. Untuk mendukung kegiatan ini telah dilakukan penetapan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Budi Daya Ikan Hias Tahun 2024.

Target IKU Persentase Sarana dan Prasarana Budi Daya Ikan Air Tawar dan Ikan Laut yang Dimanfaatkan. Target IKU tersebut pada TW IV tahun 2024 adalah 75%, dengan capaian IKU tersebut sampai dengan TW IV adalah 100%, sedangkan jika dibandingkan dengan target tahunan didapatkan capaian sebesar 133,33%.

Tabel 6. Capaian IKU Persentase Sarana dan Prasarana Budi Daya Ikan Air Tawar dan Ikan Laut yang Dimanfaatkan (Persen)

Nama SS: Terkelolanya Sistem Produksi dan Usaha yang Berkelanjutan		
Indikator Kinerja : Persentase Sarana dan Prasarana Budi Daya Ikan Air Tawar dan Ikan Laut yang Dimanfaatkan (Persen)		
Realisasi 2020 - 2024	2024	RPJMN 2020 - 2024

2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2024
-	-	-	100	75	100	133,33	-	-

Berdasarkan tabel diatas, capaian indikator untuk persentase sarana dan prasarana budi daya ikan air tawar dan ikan laut yang pada tahun 2024 tercapai 100%. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian persentase kelompok penerima yang memanfaatkan sarana dan prasarana budi daya ikan air tawar dan laut mempunyai nilai yang sama yaitu 100%, dengan jumlah paket Bantuan Sarana dan Prasarana Budi Daya Ikan Lele atau Nila Sistem Bioflok di tahun 2023 sejumlah 661 paket dan Bantuan Budi Daya Ikan Hias di tahun 2023 sejumlah 57 paket.

Pada Triwulan IV Tahun 2024 yaitu 75 %, Target Persentase Sarana dan Prasarana Budi Daya Ikan Air Tawar dan Ikan Laut yang Dimanfaatkan diatur sebagai target tahunan sehingga capaian baru disampaikan pada akhir Triwulan IV atau akhir periode tahun anggaran 2024. Hingga akhir periode Triwulan IV tahun 2024, usulan yang sudah masuk sebanyak 567 usulan dan sebanyak 567 paket telah tersalurkan atau sebesar 101,25 % dari jumlah target alokasi paket Bantuan Sarana dan Prasarana Budi Daya Ikan Sistem Bioflok Tahun Anggaran 2024. Sedangkan Bantuan Pemerintah Budi Daya Ikan Hias Tahun 2024 sampai pada akhir Triwulan IV telah tersalurkan dan dimanfaatkan sebanyak 12 Paket. Penyebab alokasi paket bantuan yang disalurkan melebihi target adalah karena adanya sisa anggaran hasil dari efisiensi anggaran, sehingga anggaran yang tersisa bisa dialokasikan untuk paket bantuan. Pada tahun ini untuk sarana dan prasarana budi daya ikan laut belum dapat diukur karena pada tahun 2024 paket bantuan yang dialokasikan khususnya yang menjadi fokus Dit. Produksi dan Usaha Budi daya atau Dit. Ikan Air Payau belum tersedia. Capaian IKU Persentase Sarana dan Prasarana Budi Daya Ikan Air Tawar dan Ikan Laut yang Dimanfaatkan belum dapat dibandingkan dengan RPJMN Tahun 2019 – 2024 karena IKU ini mulai ditargetkan pada tahun 2023. Indikiator Kinerja ini tidak terdapat dalam RPJMN tetapi menjadi Indikator Utama pada satker Direktorat Ikan Air Payau.

Pemanfaatan sarana dan prasarana budi daya ini diukur dari tersalurkannya bantuan yang telah diterima kelompok pembudi daya dan telah beroperasi atau dimanfaatkan sebagai sarana dan prasarana produksi budi daya. Tindak lanjut aksi yang akan dilakukan selanjutnya adalah melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran serta pemanfaatan sarana dan prasarana budi daya air tawar dan ikan laut yang disalurkan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pendampingan terhadap penerima juga perlu menjadi perhatian agar pemanfaatan bantuan dapat terus berjalan.

IKU 4. Persentase Kelompok Penerima Yang Memanfaatkan Bantuan Pupuk (Persen)

Jumlah pembudi daya ikan pada tahun 2020 untuk usaha pembudi dayaan ikan air payau terdata sebanyak 401.841 orang (Satu Data KKP). Sebagian besar usaha pembudi dayaan ikan yang dilakukan masih menggunakan teknologi sederhana, yang dalam proses produksinya masih memerlukan pupuk antara lain untuk menumbuhkan pakan

alami saat persiapan tambak maupun selama masa pemeliharaan ikan.

Dalam pemenuhan kebutuhan pupuk untuk melakukan proses produksinya, selama ini pembudi daya ikan mendapatkan pupuk bersubsidi untuk sub sektor perikanan dari Kementerian Pertanian. Dikeluarkannya sub sektor perikanan dari program pengelolaan pupuk bersubsidi Kementerian Pertanian dirasakan cukup memberatkan bagi para pembudi daya ikan.

Dalam rangka membantu pemenuhan kebutuhan pupuk bagi pembudi daya ikan, pada tahun 2024 pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budi daya memberikan dukungan penyediaan sarana pembudi dayaan ikan bagi pembudi daya berupa penyaluran bantuan pupuk untuk sub sektor perikanan budi daya. Berikut ini tabel capaian untuk kegiatan pupuk selama sampai akhir tahun 2024.

Tabel 7. Capaian IKU Persentase Kelompok Penerima Yang Memanfaatkan Bantuan Pupuk Dibandingkan Dengan Penerima (Persen)

Nama SS: Terkelolanya Sistem Produksi dan Usaha yang Berkelanjutan								
Indikator Kinerja : Persentase Kelompok Penerima yang Memanfaatkan Bantuan Pupuk Dibandingkan dengan Penerima								
Realisasi 2020 - 2024				2024			RPJMN 2020 - 2024	
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2024
-	-	-	100	80	100	125	-	-

Berdasarkan tabel diatas, capaian indikator untuk pemanfaatan bantuan sarana budi daya (pupuk) di masyarakat tahun 2024 tercapai 100%. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian persentase kelompok penerima yang memanfaatkan bantuan pupuk mempunyai nilai sama yaitu 100%, dengan jumlah paket bantuan pupuk dan penerima bantuan di tahun 2023 sejumlah 1.000 paket untuk 1.000 pokdakan. Indikiator Kinerja ini tidak terdapat dalam RPJMN tetapi menjadi Indikator Utama pada satker Direktorat Ikan Air Payau. Tahun 2024 paket bantuan pupuk mengalami penurunan karena anggaran bantuan pupuk mengalami pengurangan.Total penerima bantuan sarana budi daya (pupuk) di masyarakat tahun 2024 sebanyak 523 paket untuk 523 pokdakan, dengan sebaran sebagai berikut :

No	Provinsi		Kabupaten/Kota	Bantuan Pupuk yang Tersalurkan (Paket)	Bantuan Pupuk yang Telah Dimanfaatkan (Paket)	Kelompok Penerima yang Memanfaatkan Bantuan Pupuk (%)
1	Aceh	1	Aceh Tamiang	12	12	100
		2	Lhokseumawe	11	11	100
2	Lampung	3	Tanggamus	5	5	100
3	Jawa Barat	4	Pangandaran	1	1	100
		5	Kab Cirebon	5	5	100
		6	Kota Cirebon	4	4	100
4	Jawa Tengah	7	Batang	1	1	100

		8	Kota Tegal	1	1	100
		9	Brebes	10	10	100
		10	Pemalang	2	2	100
		11	Jepara	13	13	100
		12	Pati	38	38	100
		13	Demak	11	11	100
		14	Pekalongan	5	5	100
		15	Tegal	2	2	100
5	Jawa Timur	16	Lamongan	173	173	100
		17	Sampang	1	1	100
		18	Gresik	81	81	100
		19	Probolinggo	3	3	100
		20	Tuban	16	16	100
		21	Bangkalan	5	5	100
6	NTB	22	Dompu	16	16	100
		23	Sumbawa	4	4	100
7	Kalimantan Tengah	24	Seruyan	2	2	100
8	Kalimantan Selatan	25	Tanah Bumbu	8	8	100
		26	Tanah Laut	1	1	100
9	Kalimantan Utara	27	Tana Tidung	1	1	100
		28	Nunukan	3	3	100
10	Sulawesi Selatan	29	Pangkep	13	13	100
11	Sulawesi Barat	30	Mamuju	6	6	100
12	Sulawesi Tengah	31	Morowali	5	5	100
		32	Poso	2	2	100
		34	Kolaka Utara	4	4	100
		35	Bombana	36	36	100
		36	Konawe Selatan	4	4	100
		37	Buton Utara	3	3	100
14	Sulawesi Utara	38	Bolmon Utara	5	5	100
				523	523	

Pada Tahun 2024, anggaran yang dialokasikan untuk Bantuan Pupuk Sub Sektor Perikanan Budi daya senilai Rp. 3.000.000.000,00 dengan dukungan manajemen Rp. 1.000.000.000,00 dengan realisasi 99,80%. Sampai dengan akhir periode tahun 2024 seluruh paket bantuan sarana budi daya (pupuk) telah tersalurkan kepada kelompok penerima dan 100% operasional/termanfaatkan dan tidak ditemukan permasalahan/kendala pada kegiatan selama di Triwulan IV dikarenakan adanya koordinasi secara intensif dengan penyuluh maupun Dinas Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan penyaluran bantuan. Rekomendasi untuk Tahun 2025 adalah perlunya koordinasi yang lebih intensif lagi dengan pihak penyedia, Dinas, Penyuluh dan juga penerima kelompok, dalam percepatan penyelesaian pendistribusian barang serta

penyelesaian administrasi.

3.2.3. Sasaran Kegiatan (SK-3): Meningkatnya Akses Permodalan dan Jaminan Usaha

IKU 5. Pembudi daya Ikan yang Mendapatkan Bantuan Premi Asuransi Perikanan bagi Pembudi daya Ikan Kecil (Orang)

Salah satu kegiatan prioritas Direktorat Jenderal Perikanan Budi daya yang sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam adalah Bantuan Pembayaran Premi Asuransi Perikanan bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (APPIK).

Pembudi daya ikan kerap menghadapi berbagai macam risiko di lapangan mulai dari bencana alam, perubahan iklim hingga menyebabkan banjir, kekeringan dan wabah penyakit ikan. Dampak dari serangan tersebut menyebabkan daya saing dan motivasi pembudi daya ikan harus menurun.

Kegiatan penyaluran bantuan pembayaran premi asuransi usaha perikanan telah dilaksanakan sejak tahun 2017 hingga saat ini, telah terealisasi sampai dengan tahun 2020 sebanyak 29.388 orang dengan lahan seluas 37.989,5 hektar.

Tujuan bantuan pembayaran premi asuransi perikanan bagi pembudidaya ikan kecil antara lain adalah tersalurkannya premi asuransi perikanan bagi pembudi daya ikan kecil sebanyak 500 (lima ratus) orang pembudi daya ikan skala kecil. Sasaran program ini adalah pembudi daya ikan kecil yang memiliki usaha pembesaran ikan dengan teknologi sederhana dengan persyaratan umum memiliki luas lahan:

1. paling luas 2 (dua) hektar untuk kegiatan pembesaran ikan air tawar;
2. paling luas 5 (lima) hektar untuk kegiatan pembesaran ikan air payau; dan

Keluaran yang diharapkan dari program ini adalah tersalurkannya bantuan premi asuransi perikanan bagi pembudi daya ikan kecil kepada 500 orang dengan dampak yang diharapkan dari terselenggaranya kegiatan ini adalah terlindunginya 500 orang pembudi daya ikan kecil dalam menjalankan usahanya serta menumbuhkan kesadaran pembudi daya ikan untuk berasuransi. Tahapan pelaksanaan kegiatan APPIK meliputi penyusunan petunjuk teknis, sosialisasi petunjuk teknis, identifikasi dan verifikasi calon penerima dan calon lokasi (CPCL), validasi calon penerima bantuan, proses pengadaan barang/jasa, distribusi kartu polis asuransi kepada pembudi daya ikan.

Pada Tahun 2024, anggaran yang ditetapkan untuk Bantuan Premi Asuransi

Usaha Pembudi daya Ikan Skala Kecil yang disalurkan sebesar Rp. 1.200.000.000,- dalam pelaksanaannya kegiatan ini mengalami beberapa kendala dan hambatan yaitu tidak tercantumnya produk premi Asuransi nya pada sistem pengadaan elektronik katalog sektoral KKP.

Tabel 8. Capaian IKU Pembudi daya Ikan yang Mendapatkan Bantuan Premi Asuransi Perikanan bagi Pembudi daya Ikan Kecil

Nama SS: Meningkatkan Akses Permodalan dan Jaminan Usaha								
Indikator Kinerja : Pembudi daya Ikan yang Mendapatkan Bantuan Premi Asuransi Perikanan Bagi Pembudi daya Ikan Kecil								
Realisasi 2020 - 2024				2024			RPJMN 2020 - 2024	
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2024
-	-	-	-	-	-	-	10.000	-

Berdasarkan tabel diatas, capaian IKU bantuan premi asuransi perikanan bagi pembudi daya ikan kecil (APPIK) di triwulan IV tahun 2024 ini belum terdapat capaian target dikarenakan pada periode ini sudah tidak adanya anggaran. Adapun beberapa catatan kegiatan terkait kegiatan Bantuan Premi APPIK pada tahun 2024 antara lain:

- Koordinasi dengan UKPBJ – KKP terkait persiapan dalam melakukan proses PBJ melalui mekanisme e-katalog sektoral KKP, namun produk premi APPIK belum ditawarkan oleh penyedia jasa pada katalog sektoral KKP;
- Koordinasi dengan pihak penyedia jasa asuransi dalam proses penyiapan produk premi APPIK;
- Rapat pembahasan dalam rangka usulan revisi Permen KP Nomor 67 Tahun 2022 tentang Hasil Penelaahan Produk Katalog Elektronik Sektoral Etalase Produk Asuransi Kelautan dan Perikanan, berdasarkan diskusi dan pembahasan bahwa usulan perubahan Permen KP dapat disampaikan ke Kepala Biro Umum dan PBJ untuk dilakukan revisi lebih lanjut.
- Pengusulan Revisi Permen KP Nomor 67 Tahun 2022 tentang Hasil Penelaahan Produk Katalog Elektronik Sektoral Etalase Produk Asuransi Kelautan dan Perikanan yang diajukan ke Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi daya untuk diproses lebih lanjut proses revisinya.
- Terbatasnya penyedia yang memiliki produk asuransi perikanan di bidang pembudi dayaan ikan yang sudah tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta yang telah memiliki izin Produk Asuransi Bersama Asuransi Standar

Perikanan bagi Pembudi daya Ikan Kecil (APPIK) sehingga mengakibatkan lambatnya proses pembuatan produk yang ada di etalase katalog sektoral KKP.

- Telah dilakukan revisi Petunjuk Teknis Bantuan Pembayaran Premi Asuransi Perikanan bagi Pembudi daya Ikan Kecil tahun Anggaran 2024.
- Telah dilakukan verifikasi usulan calon penerima APPIK.
- Setelah mempertimbangkan hambatan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan Bantuan Premi APPIK, maka pada bulan Oktober 2024 telah dilakukan rapat Trilateral Meeting bersama dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan dalam rangka pembahasan untuk melakukan realokasi anggaran bantuan premi APPIK untuk mendukung kegiatan prioritas DJPB lainnya.
- Berdasarkan hasil rapat trilateral meeting tersebut disepakati bahwa kegiatan Bantuan Premi APPIK dihapuskan dan terhadap anggarannya dilakukan realokasi untuk menunjang kegiatan bantuan Pengelolaan Irigasi Tambak Partisipatif (PITAP) dan kegiatan sertifikasi Cara Budi daya Ikan yang Baik (CBIB).

IKU 6. Unit Usaha yang Mendapat Pelayanan Usaha dan Beraktivitas Sesuai dengan Ketentuan (Unit Usaha)

Dalam rangka percepatan perizinan usaha perikanan budi daya maka pada tahun 2021 telah diundangkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan. Permen KP tersebut merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Dalam PP Nomor 5 Tahun 2021. Berdasarkan semangat simplifikasi perizinan yang diamanatkan dalam PP 5 Tahun 2021 ini pula jenis perizinan RPIPM dihapuskan dan untuk kedepannya layanan perizinan usaha langsung dapat diakses melalui OSSRBA.

Terkait dengan adanya perubahan kewenangan sebagaimana telah disampaikan diatas, maka pada tahun 2023 Direktorat Ikan Air Payau hanya menerbitkan Rekomendasi Teknis Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan dan/atau Inti Mutiara. Ketentuan terkait Rekomendasi Teknis Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan dan/atau Inti Mutiara diatur oleh PP 5 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2023. Proses penerbitan Rekomendasi Teknis Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan dan/atau Inti Mutiara ke Dalam Wilayah Republik Indonesia hingga terbit Persetujuan Impor oleh Kementerian Perdagangan dilakukan melalui laman insw.go.id milik Lembaga National Single Window (LNSW) Kementerian Keuangan.

Selain penerbitan Rekomendasi Teknis Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan dan/atau Inti Mutiara juga melaksanakan verifikasi Sertifikat Standar Sektor Perikanan Budi daya yang dilaksanakan melalui sistem OSS RBA sesuai dengan amanat dalam Lampiran 2 PP 5 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021.

Target IKU Unit Usaha yang Mendapat Pelayanan Usaha dan Beraktivitas Sesuai dengan Ketentuan yang ditetapkan pada tahun 2024 adalah sebanyak 60 (enam puluh) Lembaga. Target IKU tersebut telah tercapai di akhir periode tahun 2024 adalah sebanyak 118 (seratus delapan belas), dengan capaian IKU sebesar 196%. Capaian IKU

Unit Usaha yang Mendapat Pelayanan Usaha dan Beraktivitas Sesuai dengan Ketentuan dapat dilihat pada tabel 9.

Tabel 9. Capaian IKU Unit Usaha yang Mendapat Pelayanan Usaha dan Beraktivitas Sesuai dengan Ketentuan (Unit Usaha)

Nama SS: Meningkatnya Akses Permodalan dan Jaminan Usaha								
Indikator Kinerja : Unit Usaha yang Mendapat Pelayanan Usaha dan Beraktivitas Sesuai dengan Ketentuan (Unit Usaha)								
Realisasi 2020 - 2024				2024			RPJMN 2020 - 2024	
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2024
394	94	55	76	60	118	120	-	-

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja Unit Usaha yang Mendapat Pelayanan Usaha dan Beraktivitas Sesuai dengan Ketentuan sampai akhir periode tahun 2024 tercapai sebesar 196%. Indikator kegiatan ini tidak dapat dibandingkan dengan RPJMN tahun 2020 – 2024 dikarenakan tidak masuk dalam kegiatan prioritas. Realisasi capaian indikator untuk perizinan usaha perikanan budi daya yang diterbitkan di tahun 2019-2021 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2022-2024 karena terdapat perubahan satuan dalam indikator, dimana pada tahun 2019-2021 menggunakan satuan rekomendasi sedangkan di tahun 2022 sampai dengan 2024 menggunakan satuan unit/lembaga. Dukungan anggaran kegiatan Perizinan Usaha Perikanan Budi daya sebesar Rp.250.000.000,- dengan capaian realisasi sampai dengan akhir tahun 2024 sebesar Rp. 249.983.400,- (99,99%).

Tingginya minat pelaku usaha terhadap perizinan usaha untuk pemasukan calon induk, induk, benih ikan dan/atau inti mutiara menandakan bahwa iklim usaha budi daya semakin meningkat dikalangan pelaku usaha pembudi dayaan ikan. Hal yang sama juga berlaku terhadap pelaku usaha yang ingin mendapatkan persetujuan bagi sertifikat standar berusaha di bidang pembudi dayaan ikan yang mana bagi pelaku usaha skala menengah/besar yang menggunakan Tenaga Kerja Asing atau yang memiliki lokasi usaha membutuhkan rekomendasi untuk permohonan persetujuan sertifikat standar berusaha dibidang pembudi dayaan ikan. Hal ini sesuai dengan amanat PP No.5/2021

tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang mengharapkan tujuan dari peraturan ini adalah mampu meningkatkan investasi, mempercepat pertumbuhan ekonomi serta memperbaiki sistem *Good Governance* di Indonesia

Tidak ada terdapat permasalahan/kendala dalam mencapai indikator kegiatan ini. Tindak lanjut dari indikator ini masih sama dengan triwulan sebelumnya yaitu meningkatkan kinerja pelayanan, kualitas layanan perizinan dan menjaga performa kinerja pelayanan sesuai dengan SOP untuk melayani perusahaan/lembaga yang diterbitkan layanan perizinannya. Rencana aksi untuk tahun berikutnya adalah tetap melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait dengan harapan tetap meningkatkan kinerja pelayanan dan kualitas layanan perizinan kepada pelaku usaha.

IKU 7. Persentase NSPK Bidang Produksi Dan Usaha Yang Disusun (Persen)

IKU Persentase NSPK Bidang Produksi Dan Usaha yang Disusun merupakan kegiatan penyusunan Norma, Kriteria, Standar dan Prosedur (NSPK) bidang Produksi dan Usaha Budi daya. Rekomendasi kebijakan ini sangat penting dalam sistem penyelenggaraan pemerintah dikarenakan untuk berkembangnya perikanan budi daya di Indonesia maka dibutuhkan suatu input sarana dan prasarana produksi yang memadai dalam rangka menunjang peningkatan produksi budi daya dalam hal ini adalah penyusunan NSPK untuk mendukung tata kelola bidang produksi dan usaha budi daya. Dalam pengertian singkatnya, norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan dalam penyelenggaran pemerintah. Standar adalah acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaran pemerintah. Prosedur adalah metode atau tata cara untuk penyelenggaraan pemerintah, sedangkan Kriteria adalah ukuran yang dipakai menjadi dasar dalam penyelenggaraan. NSPK dapat mempertegas dan memperjelas mekanisme dan tata cara yang diperlukan untuk mencapai target dan sasaran pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan.

Pada tahun 2024, target NSPK bidang Produksi dan Usaha sebesar 80 Persen. Perhitungan nilai capaian dihitung secara kumulatif berdasarkan hasil realisasi NSPK dari tahun 2020 hingga 2024 (renstra). Dukungan anggaran untuk indikator kegiatan ini sebesar Rp. 1.136.167.000,-. Capaian indikator kegiatan NSPK di triwulan IV tahun 2024

dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Capaian IKU Persentase NSPK Bidang Produksi Dan Usaha Yang Disusun (Persen)

Nama SS: Meningkatnya Akses Permodalan dan Jaminan Usaha								
Indikator Kinerja : Persentase NSPK Bidang Produksi dan Usaha yang Disusun (Persen)								
Realisasi 2020 - 2024				2024			RPJMN 2020 - 2024	
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2024
-	-	-	-	80	121,05	120	-	-

Pada periode triwulan IV capaian IKU Persentase NSPK Bidang Produksi dan Usaha yang Disusun adalah 121,05%. Persentase dihitung dari target NSPK yang disusun pada Renstra DJPB tahun 2020-2024 yaitu sebesar 38 dokumen, sedangkan pada periode 2020-2024 telah disusun sebanyak 46 dokumen. Indikator Kinerja ini tidak terdapat dalam RPJMN tetapi menjadi Indikator Utama pada satker Direktorat Ikan Air Payau. Berikut adalah daftar dokumen yang telah disusun pada periode waktu tahun 2020-2024.

No.	Judul	Tahun
1	Petunjuk Teknis Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudi daya Ikan (SEHATKAN)	2021
2	Petunjuk Teknis APPIK Tahun 2021	2021
3	Petunjuk Teknis APPIK Tahun 2022	2021
4	Petunjuk Teknis Kampung Perikanan Budi daya Bandeng Gresik	2021
5	Petunjuk Teknis Budi daya Ikan Nila, Lele sistem Bioflok	2021
6	Petunjuk Teknis Bantuan Ikan Hias	2021
7	Petunjuk Teknis Bantuan Sarana Prasarana Produksi Budi daya	2021
8	RSNI 3 Budi daya Tiram Mutiara Metode Long Line	2021
9	RSNI 3 CBIB Udang Lobster di Karamba Jaring Apung	2021
10	RSNI 3 Ikan Kobia Produksi Pembesaran di Keramba Jaring Apung	2021
11	RSNI 3 Produksi Ikan Nila di Keramba Jaring Apung	2021
12	RSNI 3 Produksi Ikan Nila di Tambak	2021
13	RSNI 3 Produksi Ikan Hias Maskoki	2021

No.	Judul	Tahun
14	Perdirjen Perikanan Budi daya Nomor 163 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Perdirjen Perikanan Budi daya Nomor 245 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Sarana dan Prasarana Budi daya Ikan Lele dan/atau Ikan Nila Sistem Bioflok Tahun Anggaran 2022	2022
15	Perdirjen Perikanan Budi daya Nomor 54 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Budi daya Ikan Hias Tahun Anggaran 2022	2022
16	Perdirjen Perikanan Budi daya Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perdirjen Perikanan Budi daya Nomor 283 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Kampung Perikanan Budi daya Bandeng di Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2022	2022
17	Perdirjen Perikanan Budi daya Nomor 102 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudi daya Ikan	2022
18	RSNI Revisi Produksi Ikan Hias Cupang (<i>Betta</i> spp)	2022
19	RSNI Revisi Produksi Ikan Hias Black Ghost (<i>Apteronotus albifrons</i>)	2022
20	RSNI Revisi Produksi Ikan Hias Discus (<i>Symphysodon</i> spp)	2022
21	RSNI Revisi Produksi Ikan Hias Badut/Clownfish (<i>Amphiphrion</i> spp)	2022
22	RSNI Revisi Instalasi Pengolahan Limbah pada Tambak Udang	2022
23	RSNI Revisi SNI CBIB Ikan Air Tawar	2022
24	RSNI Revisi SNI CBIB Udang	2022
25	RSNI Revisi SNI CBIB Rumput Laut	2022
26	RSNI Revisi SNI CBIB Ikan Laut	2022
27	Perdirjen Perikanan Budi daya Nomor 5 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Budi daya Ikan Hias	2023
28	Perdirjen Perikanan Budi daya Nomor 10 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Budi daya Komoditas Lokal Tahun Anggaran 2023	2023
29	Perdirjen Perikanan Budi daya Nomor 75 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pupuk untuk Sub Sektor Perikanan Budi daya Tahun Anggaran 2023	2023
30	Perdirjen Perikanan Budi daya Nomor 171 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Korporasi Pembudi daya Ikan	2023
31	Perdirjen Perikanan Budi daya Nomor 262 Tahun 2023 Perubahan Atas Perdirjen Perikanan Budi daya Nomor 182 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Sarana dan Prasarana Budi daya Ikan Lele atau Ikan Nila Sistem Bioflok Tahun Anggaran 2023.	2023
32	RSNI Ikan Dewa (<i>Neolissochilus soro</i>) – Bagian 1 : Pembesaran	2023

No.	Judul	Tahun
33	RSNI Kepiting Bakau (<i>Scylla Spp</i>) – Bagian 3 : Produksi di Tambak	2023
34	RSNI Ikan Gabus (<i>Channa striata</i> , Bloch 1793) – Bagian 1 : Pembesaran	2023
35	RSNI Udang Vaname (<i>Litopenaeus vannamei</i> , Boone 1931) Bagian 5 : Produksi Udang Intensif	2023
36	RSNI Rajungan (<i>Portunus pelagicus</i> , Linnaeus 1758) – Bagian 3 : Produksi di Tambak	2023
37	RSNI Produksi Ikan Hias Manfish (<i>Pterophyllum spp</i>)	2023
38	Masterplan Modeling Budi daya Kepiting Berbasis Kawasan	2023
39	Masterplan Modeling Budi daya Nila Salin Berbasis Kawasan	2023
40	RSNI Revisi (Penggabungan) Produksi Pembesaran Ikan Kerapu	2024
41	RSNI Revisi Pembesaran Udang Vanname (<i>Litopenaeus vanname</i>) Semi Intensif di Tambak	2024
42	RSNI Revisi Ikan Lele (<i>Clarias sp</i>) Bagian 6: Pembesaran Teknologi Bioflok	2024
43	RSNI Revisi (Penggabungan) Produksi Ikan Hias Arwana	2024
44	Laporan Temu Koordinasi Sosialisasi Pengelolaan Pembudi daya Lobster (<i>Panulirus spp.</i>)	2024
45	Laporan Forum Stakeholder Ikan Hias	2024
46	Laporan Koordinasi Bantuan Sarana dan Prasarana	2024

IKU 8. Pembudi daya Ikan yang Difasilitasi untuk Sertifikasi Hak Atas Tanah dalam Rangka Mendukung Akses Pembiayaan (Orang)

Pemberdayaan hak atas tanah masyarakat bagi pembudi daya ikan adalah kegiatan dalam rangka penyediaan subjek dan objek (pra sertifikasi), sertifikasi, dan pengaksesan aset ke sumber-sumber ekonomi, produksi dan pasar (pasca sertifikasi) yang dilakukan lintas sektoral secara terintegrasi dan berkesinambungan. Penyiapan sertifikasi hak atas tanah Pembudi daya ikan atau Pra SeHATkan dilakukan melalui koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan selanjutnya diusulkan kepada BPN untuk mengikuti kegiatan Sertifikasi. Hasil yang diharapkan dari kegiatan Pra SeHATkan adalah untuk menyiapkan lahan pembudi daya ikan yang memenuhi persyaratan sesuai kriteria sehingga dapat diproses penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanahnya untuk mendapatkan legalitas hak atas tanah yang dimiliki. Manfaatnya adalah sertipikat yang diperoleh sebagai tanda pengakuan kepemilikan lahan yang dapat digunakan sebagai

agunan kredit pada perbankan dan sumber pembiayaan lainnya untuk kegiatan usaha pembudi dayaan ikan.

Pembentukan Pokja Pusat, Pokja Provinsi, dan Pokja Kabupaten/Kota guna koordinasi antara Dinas Kelatan dan Perikanan Provinsi serta Kabupaten/Kota dengan BPN Kanwil dan Kantor Pertanahan pada masing-masing daerah yang menerima kuota SeHATkan dari BPN dilakukan dalam rangka mengoptimalkan penyiapan calon peserta Pra Sehatkan, Sehatkan, pemantauan Pasca Sehatkan, dan peningkatan peran penyuluh dari masing-masing daerah untuk mengkollektif data calon penerima SeHATkan, data realisasi penerima SeHATkan dan data realisasi pembiayaan dari lembaga keuangan untuk pembudi daya ikan.

Manfaat yang diharapkan dari kegiatan Pra Sehatkan adalah untuk menyiapkan lahan Pembudi Daya Ikan yang memenuhi persyaratan sesuai kriteria agar dapat diproses penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanahnya, untuk mendapatkan legalitas hak atas tanah yang dimiliki dan selanjutnya dapat digunakan sebagai agunan kredit pada perbankan dan sumber pembiayaan lainnya untuk kegiatan usaha pembudi dayaan ikan.

Pada Tahun 2024, anggaran yang ditetapkan untuk Rekomendasi Bidang Lahan pembudi daya Ikan yang akan disertifikasi sebesar Rp. 600.000.000,- alokasi dengan realisasi sampai dengan triwulan IV sebesar Rp. 599.964,700,- (99.99%).

Tabel 11. Capaian IKU Pembudi daya Ikan yang difasilitasi untuk Sertifikasi Hak Atas Tanah dalam Rangka Mendukung Akses Pembiayaan

Nama SS: Meningkatnya Akses Permodalan dan Jaminan Usaha								
Indikator Kinerja : Pembudi daya Ikan yang Difasilitasi untuk Sertifikasi Hak Atas Tanah dalam Rangka Mendukung Akses Pembiayaan.								
Realisasi 2020 - 2024				2024			RPJMN 2020 - 2024	
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2024
14.053	11.008	11.053	8.640	3.000	5.012	120	13.000	38,55

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian IKU Pembudi daya Ikan yang difasilitasi untuk Sertifikasi Hak Atas Tanah dalam Mendukung Akses Pembiayaan (Orang) di Triwulan IV tahun 2024 ini sejumlah 5.012 orang dengan target 3.000 orang, sehingga capaian IKU ini mencapai 167,07%, meskipun demikian capaian ini mengalami

penurunan bila dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 8.640 orang atau mengalami penurunan sebesar 58,01%. Hal ini disebabkan oleh banyaknya pembudi daya ikan yang telah mendapatkan fasilitasi proses sertifikasi tanahnya baik melalui program lintas sektor maupun program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) sejak program ini dijalankan, hal ini menyebabkan jumlah usulan sertifikasi hak atas tanah pembudi daya ikan mengalami penurunan.

Beberapa capaian kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudi daya Ikan tahun 2024 antara lain adalah:

1. Telah disampaikan usulan daftar nominatif pembudi daya ikan yang akan difasilitasi sertifikat tanahnya melalui surat nomor B.794/DJPB.5/PB.410/V/2023 tanggal 13 Mei 2024, kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Agraria, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN), dengan jumlah usulan sejumlah 5.346 bidang (5.012 orang) yang berasal dari 12 Provinsi dan 32 Kabupaten/Kota. Rincian usulan daftar nominatif sebagaimana tabel berikut:

No	Provinsi	No	Kabupaten / Kota	Jumlah Usulan (Bidang)	Usulan Perorang
1	Jambi	1	Muaro Jambi	50	50
2	Bangka	2	Bangka Tengah	50	50
3	Banten	3	Serang	64	64
4	Jawa Barat	4	Pangandaran	79	43
		5	Tasikmalaya	100	92
		6	Indramayu	200	200
		7	Majalengka	200	165
		8	Kuningan	500	473
		9	Karawang	120	120
		10	Purwakarta	97	87
		11	Kab Sukabumi	200	195
		12	Bandung	52	50
5	Jawa Tengah	13	Pemalang	150	148
		14	Batang	0	0
		15	Magelang	100	100
6	Jawa Timur	16	Lamongan	492	490

No	Provinsi	No	Kabupaten / Kota	Jumlah Usulan (Bidang)	Usulan Perorang
		17	Malang	750	714
		18	Situbondo	100	81
7	Nusa Tenggara Barat	19	Lombok Tengah	497	453
8	Kalimantan Selatan	20	Tanah Bumbu	200	159
9	Kalimantan Barat	21	Melawi	10	10
		22	Landak	30	30
10	Sulawesi Selatan	23	Luwu Timur	200	198
		24	Luwu Utara	100	100
		25	Gowa	300	272
		26	Pinrang	400	383
11	Sulawesi Tengah	27	Banggai	54	44
12	Sulawesi Tenggara	28	Muna	44	40
		29	Kolaka	33	33
		30	Kolaka Utara	32	26
		31	Konawe Selatan	67	67
		32	Bombana	75	75
			Jumlah	5.346	5.012

2. Usulan sertifikasi tahun 2023 yang telah terbit di tahun 2024, berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian ATR/BPN terdapat sejumlah 6.092 sertipikat yang telah diterbitkan dengan jumlah sertipikat yang telah diserahkan sejumlah 4.503 sertipikat tanah pembeda daya ikan, dengan rincian data sebagaimana tabel berikut:

No	Provinsi	Kabupaten / Kota	Usulan 2023 Terbit 2024	
			Terbit	Penyerahan
1	Sumut	Nias	99	
2	Riau	Kota Pekanbaru		
		Rokan Hulu		
		Rokan Hilir		
		Kep. Meranti		
		Jumlah	-	-
3	Sumbar	Kab. Pasaman Barat	-	-
4	Jambi	Kab. Bungo	20	-

No	Provinsi	Kabupaten / Kota	Usulan 2023 Terbit 2024	
			Terbit	Penyerahan
		Kab. Sarolangun	15	-
		Kab. Muaro Jambi	50	-
		Jumlah	85	-
5	Sumsel	Prabumulih		
6	Babel	Kab. Bangka Tengah	1	1
7	Lampung	Pringsewu		
8	Jabar	Kab. Subang	150	-
		Kab. Sukabumi	200	-
		Kab. Bandung	3	3
		Kab. Kuningan	500	500
		Kab. Majalengka	200	200
		Kab. Indramayu	100	100
		Kota Banjar	60	53
		Kab. Bandung Barat	793	582
		Kab. Tasikmalaya	176	24
		Kab. Purwakarta	200	200
		Jumlah	2.382	1.662
9	Jateng	Kab. Rembang	149	-
		Kab. Sragen	65	65
		Kab. Cilacap	50	50
		Kab. Pekalongan	50	50
		Kab. Brebes	51	51
		Kab. Pemalang	150	150
		Kab. Pati		
		Kab. Purbalingga	190	190
		Jumlah	705	556
10	Jatim	Kab. Sampang	120	73
		Kab. Pamekasan	40	-
		Kab. Tuban	100	100
		Kab. Malang	100	-
		Kab. Pacitan	50	50
		Kab. Lamongan	994	994

No	Provinsi	Kabupaten / Kota	Usulan 2023 Terbit 2024	
			Terbit	Penyerahan
		Kab. Tulungagung		
		Kab. Pasuruan		
		Jumlah	1.404	1.217
11	Kalbar	Kapuas Hulu		
		Kubu Raya		
		Sambas	30	
		Landak	30	
		Jumlah	60	-
12	Kalsel	Kab. Tapin	56	56
		Kab. Tanah Bumbu	200	200
		Kotabaru		
		Jumlah	256	256
13	Kaltim	Kota Samarinda		
		Berau		
		Kutai Kartanegera		
		PPU		
		Jumlah	-	-
14	Kalteng	Palangkaraya	17	17
15	NTB	Lombok Tengah		
16	NTT	Timor Tengah Selatan	12	12
16	Sulteng	Kab. Banggai	50	50
		Kab. Buol	52	-
		Jumlah	102	50
17	Sulsel	Kab. Luwu	100	100
		Kab. Wajo	100	100
		Kab. Pinrang	185	-
		Luwu Utara	100	100
		Gowa	300	300
		Sinjai	50	
		Jeneponto		
		Bone	99	97
		Jumlah	934	697
18	Sultra	Konsel		
		Kolaka		
		Muna		
		Jumlah	-	-
19	Sulbar	Mamasa		

No	Provinsi	Kabupaten / Kota	Usulan 2023 Terbit 2024	
			Terbit	Penyerahan
20	Sulut	Kab. Bolaang Mongondow	35	35
		Total	6.092	4.503

3.2.4. Sasaran Kegiatan (SK-4): Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budi daya Bidang Produksi dan Usaha

IKU 9. Persentase Unit Usaha yang Mendapatkan Pembinaan CBIB (Persen)

Sehubungan dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, salah satu tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya yaitu melakukan pembinaan terhadap Pelaku Usaha Budi Daya terutama yang bergerak di Budi Daya Air Payau.

Pembinaan yang dilakukan oleh Direktorat Ikan Air Payau mencakup Sosialisasi, Bimbingan Teknis dan Fasilitasi. Pada tahun 2024 telah dilakukan pembinaan terhadap 80 Pelaku Usaha yang selanjutnya siap untuk dilakukan Sertifikasi CBIB.

Tabel 12. Capaian IKU Persentase Unit Usaha yang Mendapatkan Pembinaan CBIB (Persen)

Nama SS: Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budi daya Bidang Produksi dan Usaha								
Indikator Kinerja : Persentase Unit Usaha yang Mendapatkan Pembinaan CBIB								
Realisasi 2020 - 2024				2024			RPJMN 2020 - 2024	
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2024
-	-	-	-	50	100	120	-	-

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa realisasi pada tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan IKU Pembinaan CBIB tidak ada pada tahun 2020 – 2023 dan baru muncul pada tahun 2024 sebagai akibat dari terjadinya perubahan tugas dan fungsi dari Direktorat Ikan Air Payau. Dari 2 (dua) kegiatan Bimbingan Teknis Pembinaan Penerapan CBIB di Kota Surabaya dan Kabupaten Serang, telah diikuti oleh 34 orang Pelaku Usaha dan setelah melakukan Bimbingan Teknis siap untuk

melakukan Sertifikasi CBIB. Pada tabel diatas juga terlihat bahwa capaian persentase Pelaku Usaha yang siap untuk disertifikasi telah mencapai 100%.

Selain Bimbingan Teknis yang dilakukan oleh Direktorat Ikan Air Payau, Pembinaan CBIB juga dilakukan dengan cara menghadiri kegiatan Sosialisasi yang diadakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan baik Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pemahaman di masyarakat terkait tugas dan fungsi dari Direktorat Ikan Air Payau yang sudah berubah dari Sertifikasi CBIB menjadi Pembinaan CBIB. Sosialisasi juga dilakukan untuk memperkenalkan sistem Pembinaan dan Sertifikasi CBIB yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Daftar kegiatan Sosialisasi beserta lokasinya disampaikan sebagaimana berikut:

No	Tanggal Kegiatan	Bentuk Kegiatan	Peserta
1	5 - 7 Februari 2024	Bimbingan Teknis CBIB dan Sosialisasi Perizinan Berusaha Budi Daya Provinsi DIY secara online	Pembudi daya ikan, penyuluh, perwakilan dinas kabupaten/kota se-DIY
2	20 - 22 Mei 2024	Temu lapang penerapan CBIB di Kab Meranti, Provinsi Riau	Pembudi daya ikan, penyuluh, Dinas Kabupaten Meranti
3	4 - 6 Juni 2024	Bimbingan teknis SNI CBIB di Aula BBI Ciganjur, Jakarta Selatan	Pembudi daya ikan, penyuluh, Dinas Provinsi DKI Jakarta
4	27 Juni 2024	Sosialisasi perizinan usaha tambak udang secara online	Pembudi daya ikan, penyuluh, Dinas Provins dan Kabupaten (livestreaming youtube: budi daya KKP)
5	4 - 5 Juli 2024	Gerai Layanan Perizinan Berusaha di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur	Pembudi daya ikan, penyuluh, Dinas Provins dan Kabupaten
6	10 - 12 Juli 2024	Temu lapang CBIB di Kab Bengkalis, Provinsi Riau	Pembudi daya ikan, penyuluh, Dinas Provinsi Riau
7	24 - 26 Juli 2024	Temu lapang CBIB di Kota Dumai Provinsi Riau	Pembudi daya ikan, penyuluh, Dinas Provinsi Riau
8	31 Juli 2024	Pelatihan CBIB bagi Pembudi daya ikan di Kep Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara	Pembudi daya ikan, penyuluh, Dinas

			Provinsi Sulawesi Utara
--	--	--	-------------------------

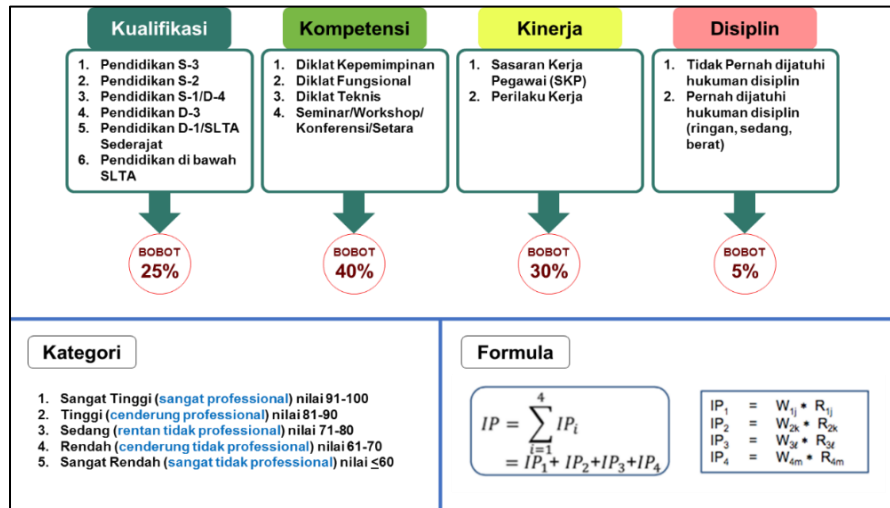
3.2.5. Sasaran Kegiatan (SK-5) : Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Direktorat Ikan Air Payau

IKU 10. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Ikan Air Payau

Indikator kinerja IKU ini adalah adalah suatu instrument yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas ASN yang hasilnya digunakan untuk penilaian dan evaluasi guna pengembangan profesionalitas profesi ASN. Indeks profesionalitas ASN diukur menggunakan standar profesionalitas ASN. Standar professional ASN terdiri dari empat dimensi, yaitu:

1. Kualifikasi, merupakan dimensi yang menggambarkan tingkat atau jenjang pendidikan yang dicapai seseorang untuk memperoleh suatu pengetahuan dan/atau keahlian khusus, sehingga seseorang tersebut mengetahui, memahami dan dapat menjalankan pekerjaan tertentu sesuai tugas jabatannya. Alat ukur yang digunakan adalah persentase berdasarkan jenjang riwayat pendidikan terakhir yang dicapai oleh PNS;
2. Kompetensi, merupakan dimensi yang menggambarkan kemampuan seseorang yang merupakan kombinasi antara pengetahuan, keterampilan dan sikap serta didukung dengan program pengembangan kompetensi berkesinambungan yang tercermin melalui perilaku kinerja, yang dapat diamati, diukur dan dievaluasi. Alat ukur yang digunakan adalah persentase berdasarkan jenis diklat yang pernah diikuti (seperti Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis, Kursus-kursus, dan Seminar/Workshop/Magang/sejenis);
3. Kinerja, merupakan dimensi yang menggambarkan pencapaian sasaran kerja pegawai yang didasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit kerja atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Alat ukur yang digunakan adalah rata-rata kinerja individu pada suatu unit kerja;
4. Disiplin, merupakan dimensi yang menggambarkan kesanggupan seorang pegawai untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam

peraturan perundang-undangan, peraturan kedinasan apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas jabatan. Alat ukur yang digunakan persentase jumlah PNS yang memperoleh hukuman disiplin berdasarkan tingkatan hukuman disiplin.



Gambar 8. Matrik Perhitungan Indeks profesionalitas ASN

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan upaya dalam hal pencapaian Indeks Profesionalitas dengan cara memberikan kesempatan ASN untuk meningkatkan kompetensinya sesuai dengan kebutuhan organisasi melalui: tugas belajar, izin belajar, Diklat, seminar/workshop/magang, dan sejenisnya. Selain itu didukung pula dengan capaian kinerja individu melalui penilaian prestasi kerja PNS dan pembinaan terhadap setiap PNS agar menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik.

Pada tahun 2024 target IKU IP ASN sebesar 85. Tidak ada anggaran khusus untuk mendukung indikator kegiatan ini. Capaian indikator kinerja IP ASN lingkup Direktorat Ikan Air Payau dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 13. Capaian IKU Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Ikan Air Payau (Nilai)

Nama SS: Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Direktorat Ikan Air Payau								
Indikator Kinerja : Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Ikan Air Payau								
Realisasi 2020 - 2024				2024			RPJMN 2020 - 2024	
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2024
78,26	83,53	81,47	83,49	85	78	91,76	-	-

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Pada tabel dapat dilihat bahwa capaian periode TW IV nilai yang dicapai sampai sebesar 78 atau 91,76% dari target yang ditetapkan atau dapat disimpulkan bahwa capaian belum memenuhi target. Kendala/permasalahan dalam pengelolaan IP ASN adalah rendahnya pegawai lingkup Dit. Ikan Air Payau yang mengunggah dokumen hasil peningkatan kompetensi atau kegiatan yang menyangkut IP ASN serta berubahnya sistem aplikasi penyampaian dokumen kegiatan melalui SiASN BKN. Indikiator Kinerja ini tidak terdapat dalam RPJMN tahun 2020-2024 tetapi menjadi Indikator Utama pada satker Direktorat Ikan Air Payau.

IKU 11. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Direktorat Ikan Air Payau (Nilai)

Pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Usaha-usaha penguatan akuntabilitas kinerja dan sekaligus peningkatannya, dilakukan antara lain melalui Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Evaluasi SAKIP ini pada dasarnya dilakukan dengan tujuan: (i) Mengidentifikasi berbagai kelemahan dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja, di lingkungan instansi pemerintah (SAKIP); (ii) Memberikan saran perbaikan atau rekomendasi untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah; dan (iii) Menyusun pemeringkatan hasil evaluasi guna kepentingan penetapan kebijakan di bidang pendayagunaan aparatur negara. Evaluasi dan penilaian SAKIP dilakukan atas komponen-komponen SAKIP sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada kedua peraturan tersebut disebutkan bahwa komponen SAKIP terdiri dari rencana strategis,

perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, dan revidu dan evaluasi kinerja. Sedangkan pada tingkat eselon I KKP, penilaian terhadap SAKIP dilakukan oleh Itjen KKP.

Pada tahun 2024 target IKU penilaian mandiri SAKIP sebesar 82. Tidak ada anggaran khusus untuk mendukung indikator kegiatan ini. Capaian indikator kinerja Penilaian Mandiri SAKIP dapat dilihat pada Tabel 13.

Tabel 14. Capaian IKU Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budi daya

Nama SS: Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Direktorat Ikan Air Payau								
Indikator Kinerja : Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Ikan Air Payau								
Realisasi 2020 - 2024				2024			RPJMN 2020 - 2024	
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2024
-	88,39	94,87	55,65	82	82,05	100,06	-	-

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi nilai PM Sakip sampai akhir tahun 2024 adalah sebesar 82,05 dari target yang ditetapkan sebesar 82. Indikiator Kinerja ini tidak terdapat dalam RPJMN tahun 2020-2024 tetapi menjadi Indikator Utama pada satker Direktorat Ikan Air Payau. Rekomendasi atau rencana aksi yang telah ditindaklanjuti dari periode sebelumnya adalah dengan telah dilakukannya penyusunan laporan kinerja tahun 2024 terhadap kegiatan untuk mendukung capaian PM Sakip di Direktorat Ikan Air Payau serta sudah dilakukan upaya untuk menyusun laporan mingguan dan laporan bulanan oleh setiap tim kerja. Rekomendasi perbaikan dalam kegiatan ini adalah dengan menambah atau mengikutsertakan perwakilan dari masing-masing tim kerja dalam menyampaikan laporan bulanan sehingga pegawai yang ditugaskan untuk menyusun atau merekap baik data dukung maupun hasil kegiatan untuk laporan kinerja setiap triwulannya dan setiap perwakilan tim kerja lebih aktif untuk berkoordinasi agar tepat dan cepat dalam penyampaian laporan kegiatan.

IKU 12. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Ikan Air Payau (Persen)

Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen Perikanan budi daya adalah Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Direktorat Jenderal Perikanan Budi daya berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada awal tahun 2023 s.d. akhir tahun 2023 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Direktorat Produksi dan Usaha Budi daya yang menjadi objek pengawasan. Cara penghitungannya adalah jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti oleh Direktorat Produksi dan Usaha Budi daya dibagi jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan kepada Direktorat Produksi dan Usaha Budi daya.

Pada tahun 2024 target IKU persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan sebesar 80. Tidak ada anggaran khusus untuk mendukung indikator kegiatan ini. Capaian indikator jumlah rekomendasi hasil pengawasan dapat dilihat pada Tabel 14.

Tabel 15. Capaian IKU Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Ikan Air Payau.

Nama SS: Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Direktorat Ikan Air Payau								
Indikator Kinerja : Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Ikan Air Payau								
Realisasi 2020 - 2024				2024			RPJMN 2020 - 2024	
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2024
57,67	88,39	100	100	80	93,94	117,43	-	-

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa realisasi prosentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Ikan Air Payau pada akhir tahun 2024 mencapai 93,94% dari target yang ditetapkan sebesar 75%. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun

2023 didapatkan bahwa capainnya lebih rendah 6,06%. Indikiator Kinerja ini tidak terdapat dalam RPJMN tahun 2020-2024 tetapi menjadi Indikator Utama pada satker Direktorat Ikan Air Payau. Adapun rekomendasi yang terbit dan tindak lanjut dari kegiatan ini adalah melakukan indikator kinerja dengan tepat yang merupakan suatu bentuk pengendalian yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di Direktorat Ikan Air Payau yang lebih baik. Lebih lanjut, rencana aksih untuk perbaikan kinerja di tahun yang akan datang diantaranya melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku, selalu adaptif dan responsive dengan perubahan kebijakan, selalu berkoordinasi dengan unit kerja terkait, mempertahankan dan meningkatkan pengendalian pengawasan kegiatan, baik pada perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan, serta

memonitoring rutin tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja dengan unit Eselon II lainnya adalah sebagai berikut :

Data Capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP" Triwulan IV Tahun 2024

No	Unit Kerja	Capaian IKU
1	Setditjen Perikanan Budi Daya	93,94%
2	Direktorat Ikan Air Laut	92,68%
3	Direktorat Rumput Laut	100,00%
4	Direktorat Ikan Air Tawar	93,94%
5	Direktorat Ikan Air Payau	93,94%
6	BBPBAP Jepara	82,43%
7	BBPBL Lampung	100,00%
8	BBPBAT Sukabumi	100,00%
9	BPBAP Situbondo	87,72%
10	BPBAP Takalar	100,00%
11	BPBAT Sungai Gelam	90,00%
12	BPBAT Mandiangin	100,00%
13	BPBL Batam	100,00%
14	BPBL Lombok	100,00%
15	BPBL Ambon	100,00%
16	BPBAP Ujung Batee	100,00%
17	BPBAT Tatelu	100,00%
18	BLUPPB Karawang	91,46%
19	BPIUUK Karangasem	100,00%
20	BPKIL Serang	100,00%

Gambar 9. Jumlah rekomendasi hasil pengawasan di Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Triwulan IV Tahun 2024

IKU 13. Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Direktorat Ikan Air Payau (Persen)

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Penghitungan persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang standar, diperoleh dari persentase

unit kerja level 1 dan 2 yang tergabung dan mendistribusikan informasinya dalam sistem informasi manajemen pengetahuan terpilih dibandingkan dengan seluruh unit kerja di KKP.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan upaya dalam hal pengelolaan SDM dan teknologi informasi untuk mendukung pencapaian IKU dimaksud yaitu dengan menggunakan aplikasi Manajemen Pengetahuan, dengan tujuan setiap user (pegawai) memiliki akses untuk mendistribusikan dan menerima informasi, sehingga diharapkan setiap individu di lingkup KKP memiliki pemahaman yang sama atas informasi yang dibagikan. Pengukuran dilaksanakan melalui penghitungan jumlah Unit Kerja lingkup KKP yang telah mengintegrasikan user manajemen pengetahuan dalam penggunaan aplikasi berbagi informasi dan data.

Pada tahun 2024 target IKU persentase unit kerja yang menerapkan pengetahuan standar sebesar 94 persen. Tidak ada anggaran khusus untuk mendukung indikator kegiatan ini. Capaian IKU manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Dit. Ikan Air Payau dapat dilihat pada Tabel 15.

Tabel 16. Capaian IKU Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar lingkup Direktorat Ikan Air Payau.

Nama SS: Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Direktorat Ikan Air Payau								
Indikator Kinerja : Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar lingkup Direktorat Ikan Air Payau								
Realisasi 2020 - 2024				2024			RPJMN 2020 - 2024	
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2024
100	100	100	133,33	94	133,33	120	-	-

Pada tabel di atas realisasi nilai unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat Ikan Air Payau sampai akhir tahun 2024 adalah sebesar 133,33% dari target yang ditetapkan sebesar 94. Capaian nilai indikator kegiatan ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya masih sama yaitu sebesar 133%. Tindak lanjut dari kegiatan ini adalah tetap mempertahankan serta meningkatkan keterlibatan / postingan di aplikasi yang ditentukan, sesuai dengan persyaratan ketentuan penilaian yang terbaru. Tidak ada kendala/permasalahan dalam mencapai indikator

kinerja ini dikarenakan kendala yang ada sudah langsung ditindaklanjuti sehingga capaian kegiatan ini dapat berjalan dengan baik.

IKU 14. Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup Direktorat Ikan Air Payau (Persen)

Indikator ini untuk mengetahui tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Satker. Direktorat Ikan Air Payau. Pada tahun 2024 target IKU tingkat efektifitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis sebesar 80 persen. Tidak ada anggaran khusus untuk mendukung indikator kegiatan ini. Capaian indikator kegiatan tingkat efektifitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis dapat dilihat pada Tabel 16.

Tabel 16. Capaian IKU Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas / Strategis lingkup Direktorat Ikan Air Payau

Nama SS: Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Direktorat Ikan Air Payau								
Indikator Kinerja : Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup Direktorat Ikan Air Payau								
Realisasi 2020 - 2024				2024			RPJMN 2020 - 2024	
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2024
-	72,5	78,8	70,27	80	82,56	103,2	-	-

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa realisasi kegiatan ini sudah mencapai target dengan nilai 82,56 atau persen capaian sebesar 103,2%. Jika dibandingkan realisasi pada akhir tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi tahun 2023. Indikiator Kinerja ini tidak terdapat dalam RPJMN tahun 2020-2024 tetapi menjadi Indikator Utama pada satker Direktorat Ikan Air Payau.

Pada periode ini tindak lanjut untuk mendukung capaian indikator kegiatan ini di tahun yang akan datang adalah koordinasi dan komunikasi ditingkatkan antara penerima bantuan, dinas perikanan daerah, UPT pelaksana kegiatan dan penanggung jawab kegiatan. Hal yang perlu menjadi perhatian selanjutnya adalah pendampingan penerima bantuan atau program sehingga tujuan kegiatan dapat tercapai.

IKU 15. Persentase Pelaku Usaha Kelautan Perikanan yang Terintegrasi KUSUKA (Persen)

Persentase pelaku usaha budi daya ikan yang terintegrasi KUSUKA merupakan penilaian atas capaian pendataan pelaku usaha yang telah terdaftar di database Kusuka dengan status submit, valid, dan revisi. Pendataan pelaku usaha merupakan kebijakan yang dicanangkan oleh Menteri KKP yang tertuang dalam Instruksi Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.147/MenKP/III/2021 tentang percepatan pendataan pelaku utama dan penguatan kualitas pengelolaan data. Pendataan pelaku usaha bertujuan untuk mengumpulkan/mendata pelaku usaha yang terlibat di pembudi dayaan ikan.

Pada tahun 2024 target IKU persentase pelaku usaha kelautan perikanan yang terintegrasi KUSUKA sebesar 91 persen. Tidak ada anggaran khusus untuk mendukung indikator kegiatan ini. Capaian indikator kegiatan KUSUKA dapat dilihat pada Tabel 17.

Tabel 18. Capaian IKU Persentase Pelaku Usaha Kelautan Perikanan yang Terintegrasi KUSUKA

Nama SS: Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Direktorat Ikan Air Payau								
Indikator Kinerja : Persentase Pelaku Usaha Kelautan Perikanan yang Terintegrasi KUSUKA								
Realisasi 2020 - 2024				2024			RPJMN 2020 - 2024	
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2024
-	-	-	100	91	100	109,89	-	-

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa perhitungan capaian kegiatan terdapat pada akhir tahun 2024 dengan nilai capaian 100%. Capaian pada tahun 2024 jika dibandingkan pada tahun 2023 sama yaitu sebesar 100%. Indikiator Kinerja ini tidak terdapat dalam RPJMN tahun 2020-2024 tetapi menjadi Indikator Utama pada satker Direktorat Ikan Air Payau. Rincian jumlah kelompok penerima bantuan pemerintah berupa Bantuan Pupuk Sub Sektor Perikanan Budi Daya yang menjadi tanggung jawab Direktorat Ikan Air Payau yaitu sebanyak 523 kelompok. Adapun persentase untuk indikator kegiatan pelaku usaha kelautan perikanan yang terintegrasi KUSUKA sebesar 100% dengan artian bahwa seluruh kelompok penerima sudah terdaftar di laman satu

data KKP dan sudah memiliki kartu KUSUKA elektronik.

Tidak ada anggaran khusus yang disediakan untuk pelaksanaan kegiatan ini. Kendala atau permasalahan selama pelaksanaan kegiatan di periode triwulan IV 2024 adalah rekapitulasi data karu kusuka yang membutuhkan waktu dalam pengecekan di aplikasi satu data kkp. Rencana aksi untuk periode selanjutnya adalah tetap melakukan pengumpulan atau rekapitulasi bantuan pemerintah yang menjadi tanggung jawab Direktorat Ikan Air Payau sehingga bisa dilakukan pengukuran persentase pelaku usaha budi daya ikan yang terintegrasi di KUSUKA untuk tahun berikutnya.

IKU 16. Persentase Layanan Perkantoran Dit. Ikan Air Payau (Persen)

Layanan Perkantoran adalah merupakan kegiatan layanan yang lebih bersifat pada pelayanan internal layanan keperluan sehari-hari perkantoran. Indikator ini menjadi pendukung untuk mencapai kegiatan manajemen internal Dit. Ikan Air Payau berupa layanan persuratan, tata usaha, kearsipan, operasional dan pemeliharaan kantor.

Pada tahun 2024 target IKU layanan perkantoran sebesar 80 persen. Tidak ada anggaran khusus untuk mendukung indikator kegiatan ini. Capaian indikator kegiatan layanan perkantoran dapat dilihat pada Tabel 18.

Tabel 19. Capaian IKU Persentase Layanan Perkantoran Dit. Produksi dan Usaha Budi daya

Nama SS: Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Direktorat Ikan Air Payau								
Indikator Kinerja : Persentase Layanan Perkantoran Dit. Ikan Air Payau								
Realisasi 2020 - 2024				2024			RPJMN 2020 - 2024	
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2024
-	-	-	99,97	80	96,99	120	-	-

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa target yang ditetapkan tahun 2024 untuk IK ini adalah sebesar 80%. Sampai dengan akhir periode tahun 2024 nilai capaian layanan perkantoran tercapai sebesar 96,99%. Nilai capaian kegiatan layanan perkantoran pada periode tahu 2024 lebih rendah 2,98% dari capaian tahun 2023. Indikiator Kinerja ini tidak terdapat dalam RPJMN tahun 2020-2024 tetapi menjadi

Indikator Utama pada satker Direktorat Ikan Air Payau. Realisasi dukungan anggaran pada pelaksanaan kegiatan ini sebagaimana tergambar pada kerja kerja pada pelaksanaan kegiatan ini sebagaimana tergambar pada kertas kerja atau RKA-K/L masuk padad kegiatan operasional dan pemeliharaan kantor dengan capaian yakni sebesar 96,99% dari total anggaran Rp 285.000.000,-. Tidak ada permasalahan/kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini.

IKU 17. Persentase Realisasi Keuangan Direktorat Ikan Air Payau

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN. Pengolahan anggaran pada Dit. Ikan Air Payau terdiri dari pertanggungjawaban penggantian uang persediaan (GUP), pembayaran LS bendahara dan pembayaran LS pihak ketiga.. Berikut ini tabel capaian realisasi keuangan Dit. Ikan Air Payau pada periode TW IV 2024:

Tabel 20. Capaian IKU Persentase Realisasi Keuangan Dit. Ikan Air Payau

Nama SS: Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Direktorat Ikan Air Payau								
Indikator Kinerja : Persentase Realisasi Keuangan Direktorat Ikan Air Payau								
Realisasi 2020 - 2024				2024			RPJMN 2020 - 2024	
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2024
-	-	-	99,96	98	99,93	101,97	-	-

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa target yang ditetapkan tahun 2024 untuk IK ini adalah sebesar 98%. Pada indikator kegiatan ini realisasi tahun lalu adalah sebesar 99,96% dan pada tahun ini realisasi 99,93%, jika dibandingkan maka realisasi tahun 2023 dan 2024 tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Capaian indikator ini sudah melebihi target yang ditetapkan. Alokasi anggaran APBN dilingkup Direktorat Ikan Air Payau adalah sebesar Rp 13.936.167.000,- dengan realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun 2024 sebesar 13.926.920.500,- atau sebesar 99,93%. Indikiator Kinerja ini tidak terdapat dalam RPJMN tahun 2020-2024 tetapi menjadi Indikator Utama pada satker Direktorat Ikan Air Payau. Penyerapan anggaran diperoleh dari pertanggung jawaban kegiatan melalui GUP LS Bendahara dan LS non-kontraktual. Kendala atau permasalahan dalam indikator kegiatan ini belum ditemukan. Rekomendasi perbaikan yang dilakukan adalah agar penanggung jawab kegiatan dapat menyelesaikan proses pertanggung jawaban kegiatan dengan tepat waktu dengan memperhatikan timeline

kegiatan yang sudah ditetapkan. Rencana aksi pada periode yang akan datang untuk kegiatan ini adalah mengefektifkan penggunaan anggaran agar anggaran yang tersedia tidak melesat dari yang sudah direncanakan, hal ini dapat dilakukan dengan memperhatikan Petunjuk Teknis, timeline dan mekanisme.

BAB IV. PENUTUP

Direktorat Ikan Air Payau merupakan salah satu unit kerja Eselon II di lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, Kementerian Kelautandan Perikanan Republik Indonesia, memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang perikanan budi daya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Ikan Air Payau berlandaskan kepada tujuan, sasaran dan program kerja yang telah diterapkan dalam Renstra KKP, Renstra DJPB dan kontrak kinerja antara Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya dengan Direktur dan/atau Pelaksana Tugas Direktur Ikan Air Payau.

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Ikan Air Payau tahun 2024 telah menyajikan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diperoleh selama tahun 2024. Terhadap capaian IKU tersebut dilakukan analisis dan evaluasi serta perbandingan terhadap capaian IKU dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Berdasarkan uraian pencapaian kinerja dalam Bab III, dari hasil analisis terhadap capaian kinerja Direktorat Ikan Air Payau sampai akhir tahun 2024 dari total 17 (tujuh belas) IKU pendukung sasaran strategis, sejumlah 14 (lima belas) IKU memenuhi target yang telah ditetapkan pada akhir tahun 2024 sedangkan 2 (dua) IKU masih belum memenuhi target. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti pada tahun berikutnya adalah sebagai berikut:

No.	Hal yang Harus Diperbaiki	Rencana Tindak Lanjut
1.	Nilai PM SAKIP Direktorat Ikan Air Payau yang tidak memenuhi target tahun 2024.	Mengintensifkan keikutsertaan perwakilan dari masing-masing tim kerja dalam menyampaikan laporan bulanan sehingga pegawai yang ditugaskan untuk Menyusun atau merekap baik data dukung maupun hasil kegiatan untuk laporan kinerja setiap triwulan tidak terlambat dan agar setiap perwakilan dari tim kerja lebih aktif untuk berkoordinasi agar tepat dan

		cepat dalam penyampaian laporan kegiatan.
2	Tenaga kerja yang terlibat di bidang budi daya ikan air payau	Mekalkulasikan kembali dalam perencanaan terkait target jumlah tenaga kerja yang terlibat di bidang budi daya ikan air payau, sehingga target jumlah tenaga kerja sesuai dengan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan.

Pernyataan Telah Direviu

Kami telah melakukan reviu atas Laporan Kinerja (LKj) Satuan Kerja Direktorat Ikan Air Payau Tahun 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Direktorat Ikan Air Payau, Direktorat Jenderal Perikanan Budi daya.

Reviu bertujuan memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid. Berdasarkan reviu kami tersebut, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan dalam laporan ini.

Jakarta, Januari 2025
Tim Reviu Laporan Kinerja
Ditjen Perikanan Budi Daya
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Analisis Kebijakan Muda,

.....
NIP.